



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA/RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : RAKER/RDP  
Dengan : Menteri Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
- Hari, Tanggal : Senin, 20 Januari 2020  
Pukul : 14.19 s.d 18.23 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E/Ketua Komisi IX DPR RI  
Acara : 1. Membahas mengenai Pembiayaan Selisih Biaya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPJU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III;  
2. Membahas mengenai Pembayaran Utang Klaim Rumah Sakit dan Penanggulangan Defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2019.
- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.  
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**  
46 dari 51 orang Anggota dengan rincian:
- 1. Fraksi PDI Perjuangan**
    1. Dra. SRI RAHAYU
    2. Dra. ELVA HARTATI, S.I.P., M.M.
    3. Dari. RIBKA TJIPTANING
    4. Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.
    5. H. IMAM SUROSO, S.H., S.Sos.
    6. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
    7. MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.
    8. Dr. DEWI ARYANI, M.Si.
    9. KRISDAYANTI
    10. H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.
    11. I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.
  - 2. Fraksi Partai Golongan Karya**
    1. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
    2. DELIA PRATIWI SITEPU, S.H.
    3. Drs. H. DARUL SISKI
    4. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E.
    5. Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.
    6. Dra. WENNY HARYANTO, S.H.

7. M. YAHYA ZAINI, S.H.

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**

1. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.
2. Ir. SRI MELIYANA
3. Ir. H. NUROJI
4. OBON TABRONI
5. drg. PUTIH SARI
6. Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL

**4. Fraksi Partai Nasionalis Demokrat**

1. FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
2. Hj. SRI KUSTINA
3. Drs. FADHOLI
4. RATU NGADU BONU WULLA, S.T.
5. drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS.

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.
2. Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag. M.M.
3. ARZETI BILBINA, S.E., M.A.P.
4. Ir. NUR YASIN, M.B.A., M.T.
5. ANGGIA ERMA RINI, M.K.N.
6. H. HARUNA, M.A., M.B.A.

**6. Fraksi Partai Demokrat**

1. Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD
2. Dra. LUCY KURNIASARI
3. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E.
4. MUHAMMAD DHEVY BIJAK

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

1. H. ANSORY SIREGAR
2. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
3. dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.
4. Dr. Hj., NETTY PRASETIYANI, M.Si.
5. H. ALIFUDDIN, S.E., M.E.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional**

1. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag.  
M.Hum., M.A.
2. Hj. INTAN FAUZI, S.H., L.L.M.
3. Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

1. Sy. ANAS TAHIR

**B. Pemerintah**

1. MENTERI KESEHATAN RI

**C. Undangan yang lain**

1. KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN)
2. DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN
3. DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN

**KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):**

Rapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ Kesehatan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin 20 Januari 2020.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,***  
**Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajaran,**  
**Yang terhormat Saudara Ketua DJSN beserta jajaran;**  
**Yang terhormat Saudara Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan beserta jajaran,**  
**Yang terhormat Saudara Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran,**  
**Yang saya hormati, Anggota Komisi IX DPR RI, serta**  
**Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Sebelum rapat ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.

**(BERDOA BERSAMA)**

Berdoa selesai.

Pada saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 42 Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat dinyatakan kuorum serta dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.19 WIB)**

Mengenai waktu rapat kami tawarkan. Sekarang ini Jam 14.19, kami tawarkan sampai Jam 16.00. Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Adapun Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah ada 2 (dua) poin:

1. Membahas mengenai pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja Kelas III;
2. Membahas mengenai pembayaran hutang klaim rumah sakit dan penanggulangan defisit dana jaminan sosial/kesehatan tahun 2019.

Sesuai agenda kita hari ini yaitu penjelasan para mitra kerja, maka kami persilakan kepada Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan yang lainnya untuk menyampaikan paparannya. Silakan Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Izin, Pimpinan, interupsi.

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan.

**Teman-teman Komisi IX DPR RI yang saya hormati,  
Para Mitra yang juga sudah hadir pada siang hari ini,**

Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita memulai rapat ini.

Yang pertama, kita masih ingat betapa sumber daya energi, waktu, pikiran kita tuangkan, kita curahkan untuk membahas satu tema yang sangat krusial dan berkaitan erat dengan hajat hidup masyarakat Indonesia yaitu BPJS, mulai dari rapat gabungan tanggal 2 September, itu sebelum saya masuk, berlanjut pada tanggal 6 sampai 7 November, yang mungkin itu menjadi rekor pertama kali di komisi ini selesai subuh atau dini hari. Berikutnya dilanjutkan tanggal 11 sampai 12 Desember yang sebetulnya satu sama lain rapat itu masih berkelanjutan. Kalau pada rapat gabungan di hasil rapat disebutkan bahwa Komisi IX DPR RI menolak rencana kenaikan karena memang Perpresnya belum lahir. Perpres itu lahir tanggal 24 Oktober 2019. Kemudian tanggal 6 sampai 7 November kita sama-sama menolak kenaikan itu dan meminta bahwa Kementerian Kesehatan dan juga BPJS untuk memikirkan bagaimana caranya mencari subsidi menutup selisih kenaikan peserta Kelas III mandiri, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

Kemudian pada tanggal 11 sampai 12 Desember akhirnya kita mendapatkan tiga alternatif solusi yang datang dari Pak Menkes. Mudah-mudahan Pak Menkes waktu itu masih ingat. Jadi alternatif itu datangnya dari Bapak, bukan dari kita yang meminta. Dari tiga alternatif itu kemudian Pak Menkes berunding dengan Pak Dirut BPJS dari tiga alternatif itu mana yang paling memungkinkan, mana yang paling *visible* untuk dilaksanakan. Dan ternyata dari tiga opsi tadi Pak Menkes dan Pak Dirut juga yang memutuskan untuk memilih opsi nomor dua yaitu membayar selisih atau menutup selisih kenaikan premi BPJS Kelas III mandiri dengan surplus dari pembayaran klaim PBI pada BPJS. Jadi artinya kau yang memulai kau juga yang mengingkari.

Kalau kemudian bahasanya millennial, ini 'PHP' Pak. Kalau tahun baru itu kita punya resolusi baru, punya harapan baru, tapi ternyata Bapak mengingkari apa yang sudah Bapak sodorkan dan itu sangat menyakitkan bagi masyarakat. Belum lagi bagi kami, wakil rakyat, Pimpinan, dianggap kita ini berbohong, dianggap kita ini tidak mampu menyuarakan dan memperjuangkan suara mereka. Dan menurut Undang-Undang MD3, sebagai Anggota DPR RI kita dilindungi oleh hukum, kita memiliki landasan hukum, bahwa ketika pemerintah atau pejabat negara tidak melaksanakan hasil rapat, tidak melaksanakan rekomendasi DPR, maka kita boleh menggunakan hak sebagai Anggota DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi,

hak angket dan juga hak bertanya. Dan itu pula yang sudah disuarakan oleh Pak Ansory Siregar sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI pada pembukaan Masa Sidang II tanggal 13 Januari pekan yang lalu bahwa beliau sudah menyatakan beberapa hal, beberapa poin secara kronologis. Akhirnya Pak Ansory menyatakan dengan sangat tegas mengajukan melalui Pimpinan DPR RI untuk menggunakan hak sebagai Anggota DPR RI yaitu menggunakan hak interpelasi. Jadi artinya bagi saya tidak ada gunanya rapat kalau kemudian kita tidak mendapatkan solusi dan mendapatkan jawaban dari pengingkar atas hasil rekomendasi rapat pada waktu itu.

Terima kasih Pimpinan.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Kalau begitu kami coba tayangkan kronologis pembahasan dari waktu ke waktu untuk kami minta penjelasan dari Pak Menteri dan yang Bapak-bapak dari BPJS yang ada. Kami mohon dari TA komisi agar bisa ditayangkan kronologis untuk kita lihat dulu untuk mencoba mengingatkan kembali dari waktu ke waktu apa yang terjadi di rapat Komisi IX ini untuk biar kita tahu apa yang terjadi sebenarnya dari waktu ke waktu. Rekamannya masih ada dan coba kita tayangkan untuk kemudian ditanggapi oleh Pak Menteri, Direktur BPJS, DJSN dan selanjutnya. Kami persilakan ditayangkan kronologis pembahasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR RI. Sambil dipersiapkan saya akan bacakan kronologisnya.

Yang pertama ini saya akan bacakan secara rinci apa yang disampaikan oleh Ibu Netty. Pada tanggal 2 September 2019 diadakan rapat gabungan Komisi IX DPR RI dan Menko PMK, Menkes, Menkeu, Mensos, Menteri BPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Salah satu agendanya yaitu membahas mengenai tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu dana jaminan sosial kesehatan tahun 2018 oleh BPKP.

Yang kedua, dalam rapat tersebut pada awalnya Dewan bersikukuh menolak kenaikan tarif. Namun Wakil Menteri Keuangan meminta DPR untuk tidak menolak. Setelah melalui lobi dan perdebatan, kedua pihak memutuskan untuk tidak menaikkan tarif iuran BPJS kelas tiga sampai validasi data kepesertaan tuntas. Jadi yang kedua kedua belah pihak memutuskan untuk tidak menaikkan tarif iuran BPJS kelas tiga sampai validasi data kepesertaan tuntas. Wakil Menteri Keuangan mengatakan pemerintah secepatnya akan menyelesaikan validasi data pada akhir September 2019.

Yang ketiga, beberapa hasil kesimpulan Rapat Kerja tanggal 2 September 2019 antara lain:

- Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit dana jaminan sosial kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai 32,84 triliun;
- Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, sampai pemerintah menyelesaikan data *cleansing*, serta mendesak pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

Poin yang keempat, berdasarkan Rapat Kerja tanggal 2 September 2019 jelas dinyatakan bahwa penolakan DPR RI terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III dikarenakan validasi data peserta BPJS Kesehatan belum tuntas. Untuk itu ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah agar menuntaskan validasi data kepesertaan sebelum menaikkan iuran BPJS kelas tiga. Hal ini sudah dituangkan dalam salah satu poin di atas hasil kesimpulan Rapat Kerja yang juga dapat diartikan sebagai rekomendasi DPR RI. Selanjutnya beberapa dampak yang berpotensi muncul akibat kenaikan iuran ini adalah:

- Peningkatan jumlah peserta non aktif, khususnya di segmen mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);
- Kemudian peserta akan pindah ke kelas yang lebih rendah seiring dengan kemampuannya dalam membayar iuran;
- Ada kemungkinan calon peserta baru enggan mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan.

Meskipun demikian beberapa dampak positif yang diinginkan dapat dicapai dari kenaikan iuran ini adalah:

- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- Pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan lebih terjamin; dan
- Keberlanjutan program JKN.

Akan tetapi hal inipun sampai dengan saat ini masih belum terlihat perubahannya secara signifikan.

Yang keenam, selanjutnya di tanggal 12 Desember 2019 Komisi IX melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang salah satu agendanya yaitu membahas tentang penundaan kenaikan iuran JKN Peserta Bukan Penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III. Dalam Rapat Kerja tanggal 12 Desember 2019 tersebut Menteri Kesehatan memaparkan tiga alternatif solusi sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah kenaikan iuran JK peserta PBPU dan BP Kelas III. Di dalam rapat tersebut disepakati oleh kedua belah pihak bahwa alternatif solusi yang akan diambil adalah alternatif dua yaitu memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta PBI yang diproyeksikan pada tahun mendatang akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Profit ini digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta PBPU dan BP Kelas III.

Dalam pembahasan alternatif dua ini beberapa kali Komisi IX DPR RI menanyakan ke Menteri Kesehatan secara regulasi dan peraturan seperti apa. Dan dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa Undang-Undang BPJS membuka ruang untuk penggunaan surplus. Dalam kesimpulan Rapat Kerja BPJS Kesehatan mengusulkan untuk menambahkan frasa 'Rapat Kerja'. BPJS Kesehatan mengusulkan untuk menambahkan frasa 'sesuai dengan peraturan perundang-undangan'.

Kemudian yang kedelapan, saat ini terdapat opini di media bahwa rekomendasi dari Komisi IX DPR RI berpotensi melanggar hukum. Perlu digarisbawahi bahwa Komisi IX DPR RI dalam posisi mendukung langkah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan dan DJSN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 74 ayat (1):

*“DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Pengawas atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara.”*

Ayat (2):

*“Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Yang ke (3):

*“Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat pemerintah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak Anggota DPR mengajukan pertanyaan.”*

Yang ke (4):

*“DPR dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR. Dalam hal ini, dalam hal dia mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum, warga negara/penduduk, dapat dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi.”*

Poin selanjutnya atas dasar poin-poin tersebut di atas, maka pada hari ini Komisi IX DPR RI meminta ketegasan sikap dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan terkait masalah kenaikan iuran JKN peserta PBU dan BP Kelas III.

Untuk itu kesempatan ini kami berikan kepada Pak Menteri untuk merespon apa yang baru kami sampaikan melalui rapat-rapat yang sudah dilalui sepanjang waktu mulai dari tahun 2019 yang lalu, baik dari Komisi IX periode sebelumnya maupun komisi yang periode sekarang ini.

Kami persilakan, Pak Menteri.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Interupsi, Pimpinan. Saleh Daulay.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Saleh.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Sebelah kanan, Ibu. Ibu kalau mempersilakan sebelah kiri, balik.

Jadi tadi Ibu mengatakan ingin mendapat ketegasan dari pemerintah. Sebetulnya ketegasannya tetap naik. Kan sudah naik ini, sudah pada bayar semua

itu. Menurut saya rapatnya bukan ke situ arahnya lagi ini, mencari solusi supaya ini janji-janji yang kemarin itu, tadi disampaikan itu sudah Ibu bacakan, capek sekali membacakan nomor satu sampai berapa tadi itu, itu terealisasi. Karena saya lihat memang Pak Menteri, mohon maaf ini, kelihatannya memang kalau bicara dengan kita itu semuanya *gampang*. Kemarin-kemarin kan begitu, "Pokoknya ini kita selesaikan, *gampang*, mudah, selesai". Tapi ternyata tidak, naik juga. Ini wibawa di DPR ini, wibawa kita secara kelembagaan, bukan partai per partai, orang per orang, tapi secara kelembagaan ini sudah runtuh karena pemerintah tetap menaikkan.

Hari ini buruh tadi datang ke sini. Perwakilan buruh diterima oleh Komisi IX. Mereka mempertanyakan sikap kami terkait dengan BPJS. Selain mereka menuntut perkara yang berkaitan dengan hak-hak dan kewenangan mereka sebagai buruh, tapi mereka juga mempertanyakan sikap kami terkait dengan mereka itu yang ada di komunitas buruh. Karena mereka sangat merasakan langsung dampak dari kenaikan ini.

Beberapa hari yang lalu sebelumnya kita panggil juga asosiasi pemerintah kepala daerah. Mereka juga terkejut dengan kenaikan ini dan mereka merasa semuanya itu memberatkan, karena APBD mereka sangat dirugikan dengan adanya kenaikan ini. Begitu juga dengan rumah-rumah sakit, asosiasi rumah-rumah sakit daerah, begitu kita tanya ternyata mereka itu merasa bahwa pelayanan tidak otomatis meningkat dengan kenaikan iurannya itu. Lalu apa manfaatnya kenaikan iuran ini? Sementara di lain pihak kita lihat pemerintah masih jor-joran itu, bansos sana-bansos sini. Tapi yang begini ini, ini hak dasar fundamental rakyat diatur dalam konstitusi. Bukan hanya undang-undang, di dalam konstitusi hak tentang kesehatan ini dijamin, tapi ini disia-siakan oleh pemerintah begitu saja.

Karena itu Pimpinan, saya minta jangan hanya soal ketegasan. Ini soal komitmen, keberpihakan negara untuk memberdayakan dan memperlakukan rakyat itu secara benar. Orang di kampung saya sedang menunggu hari ini, mereka tidak sanggup. Saya jamin, mereka tidak sanggup untuk ikut membayar ini. Orang diwajibkan, ini undang-undangnya semua warga negara wajib menjadi peserta BPJS. Tapi kalau mereka tidak sanggup, apakah mereka harus dihukum semua karena melanggar undang-undang? Tidak bisa seperti itu. Harus diselesaikan ini. Kan 'wajib' itu, coba baca Undang-Undang BPJS itu: "Setiap warga negara wajib menjadi peserta". Kalau mereka tidak sanggup apakah nanti akan dihukum? Atau mereka tidak boleh berobat? Mereka tidak boleh datang ke rumah sakit? Negara lalai, negara itu tidak adil, melanggar sila kelima Pancasila.

Ini yang saya minta ketegasan hari ini. Ini kalau saya baca kesimpulannya, baca ini kesimpulan terakhir, di sini disebut Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi. Kalau tidak bisa *ngapain* kita bicara di sini. Masak negara sebesar Indonesia ini tidak bisa memberikan solusi kepada rakyatnya. Ini kesimpulannya kan itu ini, tidak bisa memberikan solusi, *ngapain* kita di sini. Uangnya kan bukan di kita, uangnya kan di pemerintah, pemerintah yang mengumpulkan pajak, pemerintah yang buat aturan semua segala macam. Kita ini cuma meminta sebagai wakil rakyat ini selesaikan. Saya sudah capek ini rapat BPJS dibolak-balik ke sini tidak ada solusinya.

Ini saya mohon ini harus tegas. Kalau tidak kan *ngapain* kita capek lagi ini bolak-balik rapat begini, terus nanti *ngeles* lagi. Tidak ada solusi ini. Ini mohon Pimpinan, teman-teman dari semua partai, kita satu di sini. Tidak ada di sini kubu pemerintah. Yang ada adalah kubu rakyat Indonesia, kita harus bersatu dalam hal ini.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.



***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam.***

Kalau begitu kami mendengarkan.

Pak Menteri dan jajarannya mendengarkan dulu semua apa yang dihadapi oleh Anggota Komisi IX di lapangan. Kami persilakan bagi teman-teman dari Komisi IX.

Ibu Ribka, kami persilakan. Setelah itu Ibu Dewi Asmara, kemudian Ibu Mufida. Silakan, Ibu Ribka.

**F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING):**

Nanti dulu, atur nafas. Kalau sudah bicara tentang rakyat sesak dada *gua*.

**Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX,  
Saudara Menteri dan Dirut BPJS, juga DJS,**

Saya sepakat dengan adinda Saleh tadi, kayaknya sudah berkali-kali rapat tentang BPJS. Tadi saya di Rapat Intern saya sampai katakan begini, "Saudara Menteri, apa memang diciptakan seperti ini supaya kita ribut terfokus membahas persoalan BPJS terus, sehingga kita lalai, kita sampai tidak tahu mengawasi anggaran-anggaran yang lain. Tiba-tiba ada berdiri rumah sakit di Ambon 180-an miliar, di NTT berdiri rumah sakit juga di atas 100 miliar *lah*. Apa itu urgensinya?" Lalu anggaran TBC 100 sekian miliar kita sepakat saja. Bahkan kalau mau tambah kita setuju, karena penderita TBC kita masih sangat tinggi se-Asia. Bahkan dulu isu flu burung ternyata juga gambaran *rontgen*-nya ternyata juga TBC kronis.

Segala macam sampai kita tidak bisa mengawasi karena persoalan kita ribut masalah BPJS dan selalu pemerintah jawabnya defisit sekian, defisit sekian. Tadi saya bilang sama teman-teman, "Saya jadi teringat ketika membahas Undang-Undang BPJS. Tidak tahu ini dari kementerian siapa yang dulu ikut. Karena saya ketua komisi masuk di dalam Pansus tidak boleh, tapi saya selalu ada di atas kalau ketika dibahas di sini."

Adanya BPJS itu dengan segala kronologinya, seperti dalam video viral itu, tapi sebetulnya semangatnya itu memang hibah. Pemerintah itu memang mengadakan BPJS memang niatnya untuk defisit. Dulu sudah diniatkan 26 triliun. Kalau sekarang masih 20 triliun masih kecil itu. Jangan dibuat alasan kita masih defisit sehingga harus naik, harus macam-macam. Tidak bisa! Ini jaminan, bukan asuransi. Memang niatan hibah, itulah tanggung jawab negara. Saya suka bilang, "Dorong Saudara Menteri, berani tidak bilang ini Kelas III." Rumah sakit negara maupun swasta dibeli dulu sama negara ini, *toh* juga tidak bakalan terpakai semua. Orang-orang menengah ke atas tidak mau di Kelas III. Tapi paling tidak ada tanggung jawab negara. Bahkan saya *ngobrol* dengan Pak Hasbullah Tabrani itu, "Bisa *nggak* Bang begini, begini...". Bahkan kelas dua juga bisa ini. Coba *ngobrol* deh. Saya bilang Komisi IX, "Undang itu Pak Tabrani".

Kenapa masih semua di alasannya karena defisit? Ya memang untuk defisit, untuk rugi. Kalau diomongin masalah kayak asuransi, tidak ada untungnya *lah*. Itu memang hibah negara, tanggung jawab negara. Kalaupun masih ada orang mandiri bayar itu sudah *alhamdulillah*. Seperti saya bilang, masih lagi dipaksa lima orang

itu, pemerasan itu saya bilang. Terus sekarang naik lagi. Tadi kronologinya panjang lebar Ketua Komisi membacakan, sikap DPR menolak kenaikan itu. Pemerintah untuk menaikkan premi itu persetujuan DPR. Kalau DPR menolak, nekat naik, itu melanggar undang-undang. Di opini sekarang malah dibilang DPR yang melanggar undang-undang. Kalau rumah sakit nolak pasien, itu yang melanggar undang-undang. Wartawan, catat itu, rumah sakit yang menolak pasien itu melanggar undang-undang. Bukan Komisi IX yang melanggar undang-undang. Jangan diputar balik. Teman-teman wartawan membela yang benar, jangan membela yang bayar. Kadang-kadang pesan sponsor juga ini kawan-kawan wartawan. Nanti kalau sudah istrinya mau melahirkan WA *gua deh*, "Ibu, istri saya mau melahirkan, anak saya sakit". Wartawan juga termasuk tidak dapat KIS. Ini kita lagi memperjuangkan hak wartawan juga ini. Semua rakyat Indonesia ditanggung oleh negara. Saya sudah bilang sama teman-teman, jangan ada yang lagi diwawancara inilah datanya *lah*, Kemensos *lah*, apa *lah*, sudah. Kalau bicara data nanti orang meninggal sudah banyak lagi. Sudah tidak ada data. Semua warga negara ditanggung oleh negara. Kalau negara baru bisa menjaminkan Kelas III, tapi paling tidak ada upaya negara. Kelas III dulu. syukur-syukur *alhamdulillah* besok-besok Kelas II, Kelas I. Kelas III dulu, swasta/negeri, bisa sebetulnya. Ini teman-teman BPJS coba *deh*. Malah sekarang laporannya dari mana-mana mau bawa advokasi rakyat ke rumah sakit, rumah sakitnya katanya sudah diputus sama BPJS kerjasamanya. Saya WA Pak Fahmi Idris, WA Mbak Handayani, WA Mudiarno, katanya rumah sakitnya menolak. Tapi dari versi ini BPJS yang menolak. Dulu DJSN yang menyalahkan rumah sakit tidak mau kerjasama dengan BPJS. Sekarang rumah sakit semua ingin kerjasama BPJS, BPJS yang tidak mau. Bagaimana *sih*? Satu keharusan rumah sakit mau kerjasama BPJS, BPJS-nya yang ini *lah*, *begono lah*, begini.

Kita ke Binjai, walikotanya punya rumah sakit kebetulan tipe B. Bayangkan Ibu Ribka, rakyat kami tidak bisa menikmati rumah sakitnya. Karena apa? Dia di tipe B. Jadi rakyatnya harus dulu Puskesmas, ke C dulu, jauh, baru dirujuk ke B. Coba rujukan kayak begitu. Padahal nanti di C juga sudah bayar dulu BPJS, di Puskesmas bayar dulu. Itu kebobolannya BPJS kayak begitu, karena tiap rujukan bayar, tiap rujukan bayar. Coba dievaluasi seperti itu.

Tapi paling tidak sekarang ada terobosan ini rakyat biar adem. Tadi buru-buru benar itu, kita sampai ditekan hak interpelasi. Kalau sampai hak interpelasi repot ini nanti. Nanti fraksi-fraksi menyuruh kita lobi antar fraksi. Yang paling repot saya Fraksi PDI Perjuangan. Saya sampai berikrar sama teman-teman, tidak apa-apa ini wartawan juga catat, Saya Fraksi PDI Perjuangan fraksinya pemerintah, kalau gara-gara saya ikut menolak kenaikan BPJS ini saya harus dipecat oleh partai saya, saya tidak apa-apa, karena ini demi rakyat. Saya titipkan anak saya sama Pak Ansory satu, sama fraksi apa lagi satu. Anak saya banyak soalnya, masa Tuhan tidak pelihara. Saya yakin burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya umat ciptaan-Nya. Masak dari DPR saja. Tapi kalau gara-gara di DPR saya terdemoralisasi, karena saya jabatan di DPR, saya bergeser untuk membela rakyat, saya disumpahi sama rakyat yang memilih saya. Ketika rakyat memilih saya tidak akan ragu saya pilih Dr. Ribka Tjiptaning. Masak sekarang saya membela konsituen saya harus ragu, "Nanti *gua* dipecat ini, nanti *gua* dipecat". Tidak *lah!* Benar ini Saudara Menteri, saya betul berkomitmen itu. Kalau saya harus ditegur tidak apa-apa *lah*, pusing saya. Bagaimana ya, orang-orang itu betul-betul. Apalagi sudah baca anak yatim piatu kakak beradik.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Dahsyat angkanya. Dari Kelas I, Kelas II turun ke Kelas III sudah menembus di angka 800 ribu. Iya benar ya, Pak Dirut ya? Kelas I saja yang katanya mampu mereka juga turun kelas. Itu berarti apa? Kenapa mereka tidak bertahan di Kelas I kalau memang mereka mampu? Mereka pindah dan sekarang sudah menembus di angka 80 ribu angka migrasi ini. Apakah defisit akan selesai? Tidak akan! Hanya akan menambah benang *ruwet* dari masalah defisit BPJS ini.

Maka, kami yang terakhir, Pimpinan, melengkapinya dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, saya juga sama dengan teman-teman sebelumnya, kalau rapat hari ini tidak ada keputusan apapun juga tutup saja sekarang dan saya juga saat ini juga saya mohon pamit dari ruangan ini.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Ibu Dewi Asmara.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Baik, terima kasih.

**Pimpinan, Rekan-rekan Komisi, Menteri Kesehatan beserta BPJS,**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Pertama-tama tentunya saya sebelum paparan dimulai tentu sudah membaca dan sangat terganggu rasanya bahwa Bapak-bapak menghadiri rapat hari ini dan Ibu sekalian, ketika saya mendapati ada kata-kata antara lain dikatakan oleh BPJS Kesehatan, "Oleh karenanya tidak ada kementerian/lembaga dapat mengendalikan, mengatur dan mengintervensi BPJS Kesehatan, kecuali ada penugasan khusus dari presiden". Bahkan di akhir bagian, jadi memang saya mendahului, Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi. Jadi menjadi pertanyaan saya, Bapak itu hadir di sini dan Ibu itu dasarnya apa ya? Apakah tahun-tahun kemarin ketika dibentuk Dewan Pengawas dan lain atau Bapak-bapak hadir ke sini itu kira-kira dengan dasar apa? Bapak menerima anggaran, meskipun anggaran itu ditetapkan di Komisi XI beserta Badan Anggaran menetapkannya di dalam rapat dengan Menteri Keuangan, itu kira-kira ada tidak ya lembaganya yang ikut? Dalam hal ini saya sangat menyayangkan *statement* yang ada di sini, dengan kata lain Bapak tidak memandang Bapak-bapak itu hadir ke sini karena apa dan siapa yang ada di sini, termasuk diri Bapak sendiri itu siapa?

Hal ini sudah terlihat ketika beberapa waktu yang lalu di media dikatakan: *apabila melaksanakan rekomendasi DPR, maka itu berpotensi*, baru dikatakan *berpotensi melanggar*. Ini sepertinya media membolak-balik. Padahal rekomendasi itu datangnya dari Kemenkes. Sejak kapan kita mengatakan solusi untuk membayar selisih itu dari iuran? Tidak ada DPR pernah mengajukan itu. Dan mengapa tidak cukup *gentlement* bahwa Menkes mengaku: "Itu saya yang

*merekomendasikan*". Hanya sayang ketika itu DPR reses, sehingga tidak menyampaikan *press release* mengenai itu. Itu rekomendasi dari Kemenkes, saya catat. Pada tanggal 12 Desember kalau saya tidak salah Pak Menkes mengatakan bahwa meskipun nanti sudah dikeluarkan Perpres 75/2019 surplus PBI itu bisa dimanfaatkan untuk membantu subsidi tingkat Kelas III. Dan itu sudah bisa dan itu Kemenkes tidak melanggar hukum. Yang kami sayangkan, pada rapat tanggal 6 Januari seharusnya Pak Menkes itu ketika rapat dengan Menko mengenai kenaikan premi itu *kan* ada Menteri Keuangan, ada BPKP, ada yang lain-lain, harusnya *kan* bisa meyakinkan. Kalau kemudian tidak, itu bukan rekomendasi dari DPR. DPR sudah merekomendasikan hal-hal lain. Seandainya pun rekomendasi itu dikeluarkan DPR, dalam kali ini, sekaligus *clearance* kepada masyarakat, segala sesuatu yang disampaikan oleh Anggota DPR dari komisi manapun, dari fraksi apapun, yang dinyatakan baik di dalam maupun di luar gedung DPR itu memiliki hak imunitas, selama yang dikatakan ini adalah berkaitan dengan apa yang menjadi haknya untuk menyatakan pendapat.

Oleh karenanya kami bersuara dan kami mengadakan rapat tidak sekedar kami undang-undang untuk senang-senanginya rapat dengan Bapak sehari-hari sampai pagi, karena kami ingin, katakanlah *cerewet*, seperti Bapak yang mungkin itu Bapak sampaikan kepada menteri-menteri lain. Tetapi ini karena memang kewajiban kami adalah menyampaikan suara rakyat dengan rapat. Itu memang pekerjaan kami. Itulah sebabnya kami mengadakan rapat. Namanya saja tugas kami Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Panitia Kerja, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Anggaran dan berbagai rapat. Semua memang rapat, itu pekerjaan kami. Dan karenanya setiap yang kami undang ke sini adalah berdasarkan undang-undang. Kami bukan bekerja dengan rapat-rapat tanpa dasar hukum. Kami ingatkan, dalam rapat-rapat yang Bapak diundang, kami memakai undang-undang (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018). Dan ini sudah diubah dengan ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Perlu saya ingatkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini adalah Undang-Undang MD3, adalah undang-undang yang memberikan kewenangan secara konstiusional kepada kami untuk mengadakan rapat-rapat. Bahkan untuk bermitra dengan Bapak, termasuk di sini Menkes dan BPJS. Apa yang Bapak cantumkan di sini kalau Bapak katakan tidak intervensi, mengapa Bapak datang ke sini? Dan ini di dalam perubahan ini, tadi mungkin dibacakan, saya *highliht*, di dalam perubahan terhadap MD3 sudah ada perubahannya. Ini sudah berupa undang-undang. Bapak bisa minta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, yang intinya adalah bahwa DPR itu boleh memberikan rekomendasi dalam berbagai rapat. Tadi sudah dikatakan, RDP, Panitia Kerja dan sebagainya. Dan setiap orang wajib menindaklanjuti. Apabila tidak atau mengabaikan, apabila itu menyangkut pejabat pemerintah DPR memang bisa atau dapat mengadakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak Anggota DPR mengajukan pertanyaan. Bahkan dalam ayat (4) Pasal 74 DPR dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan presiden dan/atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR. Bukan kami ingin melebih-lebihkan hak kami, tetapi ini kami ambil sebagai suatu tanggungjawab juga, artinya ini tanggungjawab kita bersama. Jadi kalau Bapak datang rapat di sini, kami undang, kemudian hanya memberikan, pertama dikatakan tidak bisa diintervensi, kedua tidak ada solusi, lalu apa gunanya Bapak datang ke sini? Bapak saja tidak sadar posisinya apa, sehingga karenanya mungkin kepada BPJS kalau sampai mengeluarkan itu saya

minta Bapak keluar dari ruangan ini kalau Bapak merasa tidak ada kapasitas di sini, kami akan meneruskan dengan Kemenkes. Silakan Bapak/Ibu yang merasa BPJS silakan keluar, kecuali Dewan Pengawas yang memang dipilih oleh DPR.

Kemudian untuk Bapak Kemenkes saya sampaikan, mungkin silakan tutup kuping kalau BPJS, bahwa sesungguhnya berdasarkan audit BPKP masih ada dana audit mengenai DJS Kesehatan bahwa pencatatan piutang PBPU itu masih *understated*. Perhitungan BPJS kesehatan itu ada 2,1 triliun. Jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 jumlah piutangnya adalah 5.574.339 triliun, sehingga ada selisih sebesar 3,464 triliun.

Ada skenario pertama, ini kami sudah kaji, kebutuhan anggaran satu peserta Kelas III kalau dibayarkan semua secara gratis dalam satu tahun satu peserta membutuhkan 42 ribu kali 12 adalah 504 ribu, sehingga ada potensi anggaran dari selisih piutang PBPU yang dapat meng-*cover* peserta Kelas III sebanyak 6.874.402 orang, jadi sekitar 6,8 juta.

Skenario kedua, jika yang kita bayarkan adalah selisih kenaikan, yaitu sebesar 16.500, maka kebutuhan anggaran satu peserta Kelas III dalam satu tahun itu kan 198 ribu, sehingga potensi peserta yang bisa kita bayarkan adalah sejumlah 17.498.479 orang. Memang masih kurang, karena baru 17 juta, sementara yang kita ada datanya adalah sekarang 19 juta.

Dari mana kita temukan lagi dana yang untuk selisih 2 juta orang itu lagi? Itu bisa kita dapatkan, pertama ada kasus kelebihan klaim yang menyedot dana jaminan sosial sebesar 845,507 miliar. Ini mungkin masih bisa kita tarik. Kemudian yang kedua yang patut menjadi pengetahuan kita bersama dan masyarakat, penghematan dana jaminan sosial harusnya adalah dengan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. Saya ambil contoh saja untuk tahun 2020 diperkirakan dana operasional adalah 4,07 triliun. Harusnya ini ada efisiensi. Kalau kita merujuk rencana kerja anggaran RKAT 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar 32,88 miliar. Jika dibagi ke 8 anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif 4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati insentif 342,56 juta per bulan. Sementara beban insentif Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga antara lain kurang lebih kepada 7 Dewan Pengawas rata-rata sebesar 2,55 miliar. Jika dalam 12 bulan insentif yang diterima Dewan Pengawas adalah 211,14 juta per bulan, dengan kata lain kalau kita berbicara mengenai suatu badan yang rugi *mbok* ya ada hati juga untuk mengadakan penghematan. Tentu dengan mengadakan efisiensi operasional saya mengharapkan bisa menemukan angka untuk bisa mendapatkan yang 2 juta lagi. Jadi yang 17 juta didapatkan dari piutang PBPU yang masih *understated* yang sebesar tadi itu adalah sekitar 3,464 triliun dan sisanya diambil dari situ. Atau seperti kata Menteri Keuangan pada rapat bersama, apabila memang masyarakat tidak mampu silakan mendaftar untuk PBI. Tolong kepada pemerintah bagaimana mensosialisasikan ini, bagaimana cara mendaftar. Tolong dipanggil bupati-bupati bagaimana cara mensosialisasikannya, ke kantor mana, apakah di kecamatan, apakah di desa, apakah dana desa boleh dipakai untuk tahun ini untuk pendaftaran, sehingga semua warga negara bisa ditanggung dengan PBI. Jadi harus ada jalan keluar. Jangan kita bicara mau maju dan sebagainya tapi tidak diberikan jalan keluar. Itu kira-kira.

Jadi dalam kesempatan ini kalau kita mau meneruskan rapat dengan hanya tidak merasa bisa diintervensi, kecuali dengan presiden atau apapun yang dianggap oleh BPJS, kemudian juga tidak ada solusi, saya rasa kita tidak perlu rapat di sini dan untuk seterusnya silakan. Atau ini memang dikoreksi atau sama sekali sebaiknya kita tidak perlu rapat dengan BPJS, silakan berjalan sendiri, *toh*

rakyat yang akan bisa menilai. Dan ini kita perlu bersurat, baik kepada Badan Anggaran maupun pada Komisi XI, untuk bisa menyampaikan bahwa mitra kerja yang secara resmi kita terima dalam Rapat Paripurna sebagai mitra kerja Komisi IX mengatakan tidak lagi menjadi mitra kerja dengan DPR RI.

Sekian dan terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

**INTERUPSI F-PD (ANWAR HAFID):**

Pimpinan, sebelah kanan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Anwar Hafid.

**F-PD (ANWAR HAFID):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian.***

**Para Bapak dan Ibu Pimpinan, Teman-teman Komisi IX, Pak Menteri, Pak Dirut dan seluruh jajaran,**

Apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi saya ingin menyambung. Yang pertama bahwa kalau saya melihat sesungguhnya persoalan ini secara teknis teman-teman, baik yang ada di kementerian maupun di BPJS, sangat paham ini. Jadi tidak perlu kami ajari Bapak bagaimana caranya untuk mendapatkan untuk perhitungan dan sebagainya, karena saya *haqqul yaqin* Bapak-bapak pasti paham.

Pertanyaan saya yang pertama saya ingin tanyakan, kendala utamanya ada di mana ini? Tolong nanti kalau ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya untuk dibuka siapa sebenarnya yang tidak mau untuk merespon apa suara rakyat. Ini suara rakyat se-Indonesia dan kita di sini sama-sama. Tidak ada lagi fraksi, semua kita ini mewakili rakyat. Dan bahasa kami ini bukan bahasa mengada-ada, bukan bahasa untuk mencari popularitas, bukan. Karena kami yang setiap hari berhubungan dengan rakyat, tiap hari mendengar telepon dari rakyat, yang mendengarkan begitu banyak keluhan tentang kenaikan BPJS ini sejak tahun 2019 sebelum diberlakukan ini.

Oleh karena itu saya meminta kepada kesempatan ini supaya transparan kita. Sesungguhnya ini kebijakan negara atau kebijakan apa, sehingga ini tidak bisa kita perjuangkan? 'Bapak Menteri sudah menyampaikan pada dua kali pertemuan akan memberi solusi. Tapi hari ini saya sangat kaget mendengar dua alasan dari Pak Menteri, yang pertama tidak bisa mengintervensi BPJS. Saya ulangi, pada kesempatan ini saya bacakan: *"Menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional berhubungan dengan badan hukum publik lainnya, badan kerja tersebut bersifat kemitraan, koordinatif, konsultatif, sinergi dan joint working. Oleh karenanya*

*tidak ada kementerian/lembaga yang dapat mengendalikan, mengatur dan intervensi BPJS Kesehatan, kecuali ada penugasan khusus dari presiden.*" Ini saya bingung negara ini jadi begini.

Kementerian Kesehatan secara hirarkis adalah penanggungjawab utama kesehatan di republik ini. Kemudian di sini ada 'tidak bisa diintervensi', dari mana kira-kira? Ini struktur organisasi apa kita ini? Ini hebat sekali BPJS kalau begitu di republik ini, hanya presiden yang bisa memerintahkan. Jadi ada apa hubungannya? Menteri Kesehatan apa? Sementara anggarannya itu tercantum di dalam anggaran Kementerian Kesehatan. Penanggungjawab utama keuangan BPJS ini adalah Menteri Kesehatan.

Kemudian yang kedua, Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi atas permasalahan hutang ke lain rumah sakit dan defisit DJS ini karena sangat membutuhkan transparansi dari BPJS Kesehatan untuk mengungkapkan masalah keuangan yang terjadi dalam BPJS Kesehatan. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Berarti yang pertama kesannya bahwa ada sesuatu di dalam BPJS ini sekarang yang disembunyikan. Pak Menteri sudah mengira terbuka, mengira-ngira di sini bahwa ada yang tidak transparan, sehingga Pak Menteri belum bisa atau belum berani memberikan solusi, padahal temuan BPKP sudah jelas.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, sesungguhnya ini bukan soal teknis, ini persoalan Pak Menteri, Pak Dirut dan kita semua yang hadir di sini. Ini persoalan sebetulnya tidak bicara teknis. Ketika ada pakar hukum mengatakan bahwa rekomendasi Komisi IX itu bertentangan, saya bilang ini kita tidak bicara hukum di sini, ini kita bicara rakyat, rakyatlah di atas segala-gala dari hukum yang ada di republik ini, rakyatlah yang harus kita lindungi. Undang-undang lahir karena rakyat dan rakyat hari ini banyak yang menderita karena BPJS Kesehatan ini dinaikkan, utamanya mereka yang Kelas III. Dari hasil reses perjalanan kita, saya masuk di 9 rumah sakit yang saya datangi, saya melihat begitu banyak rakyat yang hari ini belum bisa ter-cover di dalam kepesertaan BPJS. Bahkan ada yang sudah Kelas III mandiri mereka terpaksa tidak bisa lagi sekarang untuk membayar itu.

Saya sering ingat bahasa Bapak Presiden selalu mengatakan, kami dulu waktu masih bupati saya sering mengatakan Beliau, ambil diskresi dan meminta kepada kepolisian dan kejaksaan untuk tidak memproses mereka yang mengambil diskresi kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang tapi demi kesejahteraan rakyat, demi kemaslahatan rakyat.

Ini kita bicara kemaslahatan rakyat. Rakyat kita sekarang ini sedang membutuhkan itu, Pak Menteri. Dan saya kira banyak orang pintar mengatakan begini, seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa melampaui dirinya sendiri. Kalau kita tidak melampaui diri kita sendiri, kita bukan pemimpin. Dan Pak Menteri sudah mengatakan di awal ketika kita ketemu di sini, Pak Menteri akan mempertaruhkan jabatannya untuk persoalan rakyat ini. Dan saya *haqqul yaqin* Pak Menteri memiliki nurani itu.

Oleh karena itu saya minta masyarakat, kita di mana-mana selalu bertanya mana suara, mana yang sudah selalu di *publish* di dalam setiap Rapat Kerja itu. Sekarang hari ini kami sudah membayar. Jadi karena itu saya tidak ingin bicara teknis hari ini. Kita ingin bicara soal kebijakan seorang pemimpin. Kita tahu bahwa banyak persoalan di negeri ini.

Daya beli masyarakat hari ini sangat menurun, kondisi ekonomi kita belum stabil. Datang lagi ini persoalan, BPJS. BPJS ini kalau yang lain-lain ini masih bisa kita tolerir. Tapi ini hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan. Saya kira Pak Menteri saya mohon, saya tahu betul Pak Menteri, mohon pertemuan kita kali ini

kita tidak lagi menyalahkan antara satu dengan yang lain. Tapi saya minta bahwa tidak usah kita berhitung teknis. Karena kalau kita berhitung-hitung teknis hari ini tidak akan pernah ketemu dan pasti rakyat kita akan semakin banyak yang korban yang tidak dapat dilayani kesehatannya ketika dia sakit. Itu yang menjadi nurani kita hari ini.

Kemudian selanjutnya saya juga ingin meminta kepada kita semua, khususnya Pak Menteri dan Dirut BPJS, di lapangan di daerah-daerah nun jauh di sana, di daerah-daerah kepulauan, sekarang hari ini bukan cuma rakyat menjerit, pemerintah daerah juga menjerit hari ini. Dengan adanya kenaikan ini beberapa daerah yang saya temui 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah semua bupatinya mengeluh. Yang dulu mereka hanya menganggarkan misalnya 30 miliar, sekarang harus naik menjadi 50 miliar. Tapi mereka harus lakukan ini, daerah harus lakukan, karena ini tanggung jawab moral mereka. Kalau daerah bisa menyadari itu, para pemimpin daerah bisa menyadari itu, kenapa pemimpin kita di pusat tidak menyadari itu?

Ini harapan saya, Pak Menteri, sekali lagi saya sangat berharap. Ini pertemuan kita yang terakhir berkaitan dengan BPJS dan berkaitan dengan kenaikan iuran ini. Silakan dinaikkan, biar seribu kali lipat tidak apa-apa kalau menurut saya, yang penting orang miskin itu bisa terlayani dengan baik, mereka itu bisa masuk dalam tanggungan negara. Yang tidak dinaikkan saja mereka susah. Apalagi dengan sistem pendataan kolektif. Kalau mungkin satu-satu sistem pendataan itu mereka masih bisa bayar. Tapi dengan pendataan kolektif, mereka sama sekali. Ini suara bukan dibikin-bikin, Pak Menteri. Ini suara hati nurani rakyat kita.

#### **INTERUPSI F-PDIP (Dr. DEWI ARYANI, M.Si.):**

Interupsi, Pimpinan.

Maaf Pak Anwar, saya potong sedikit.

Saya hanya ingin membatasi rapat ini dengan pertanyaan singkat. Kalau di sini tertulis 'harus ada penugasan dari presiden'. Pertanyaan saya, Pak Menteri yang *nyangking* ke sini siapa? Saudara Menteri ini datang ke sini ini *dicangking sopo*? BPJS? Apakah ada penugasan dari presiden? Itu yang pertama.

Yang kedua, di sini presentasi Pak Menteri ini yang membuat siapa? Asal *comot* dari *website* BPJS, sementara isinya menunjukkan arogansi BPJS Kesehatan. Jadi untuk apa? Direksi BPJS Kesehatan datang ke sini hanya untuk memberikan *show off*, istilahnya arogansinya ditunjukkan kepada Komisi IX bahwa kami tidak bisa diintervensi siapapun, kecuali penugasan presiden. Pak Menteri Kesehatan di sini sebagai penugasan presiden atau *dicangking* Pak Fahmi?

Jadi percuma, Pimpinan, kita di sini *ngomong ngomel* semua, rapat emosi, *stroke* nanti lama-lama kita semua. Lebih baik ditutup sekarang. Dipastikan dulu Pak Menteri hadir ke sini atas penugasan presiden, kesadaran sendiri atau *dicangking* BPJS Kesehatan untuk menemani menunjukkan arogansinya di depan kita semua.

Terima kasih, Pimpinan.

#### **F-PD (ANWAR HAFID):**

Saya lanjutkan dulu, saya minta. Saya belum selesai bicara, tolong teman-teman beri saya waktu untuk bicara.



**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Anwar lanjut.

**F-PD (ANWAR HAFID):**

Terima kasih.

Saya lanjutkan. Saya ini masih banyak. Mendingan saya bicara daripada tidak bicara, nanti saya *stroke* benar. Karena kalau saya tidak bicara, saya keluar dari sini saya bisa *stroke*. Jadi saya harus bicara mengeluarkan *uneg-uneg* saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa, siapa tahu Allah memberi hidayah kepada Dirut BPJS dan semuanya untuk bisa memahami keluhan rakyat hari ini.

Jadi saya sambung kembali bahwa kita berharap sekali lagi, bukan harapan, kalau mendesak mungkin di atasnya mendesak, mendesak, menekan, mengancam. Yang terakhir, siasat. Mungkin itu yang perlu kita lakukan hari ini di Komisi IX, karena kita ini Komisi IX tidak ada lagi harganya kita di rakyat ini. Kita hanya duduk di sini, cuma BPJS kau tidak bisa perjuangkan.

Jadi saya minta sekali lagi, saya mohon maaf, Pak Menteri, kalau saya sedikit besar suara, karena saya dari kampung. Begitu orang kampung kalau lagi emosi. Tapi saya emosi ini bukan karena pribadi saya, tapi saya emosi karena rakyat yang hari ini dari Sabang sampai Merauke sedang menjerit dengan kenaikan BPJS ini.

Kemudian saya juga berharap kepada kita semua supaya kementerian, dalam hal ini juga BPJS, segera berusaha untuk melunasi secepatnya utang-utang yang ada di rumah sakit itu. Karena beberapa rumah sakit hari ini yang saya dapati pelayanan kesehatan menjadi menurun. Rata-rata utang BPJS di rumah sakit yang saya datangi itu mulai dari April 2019 belum terbayarkan. Ini juga sangat bermasalah dalam pelayanan kesehatan kita.

Saya kira untuk BPJS itu dulu. Itu saja dulu, Pak.

Terima kasih.

Sekali lagi, Pak Menteri, mohon maaf kalau penyampaian saya terlalu keras seperti ini.

Terima kasih.

***Wallaahul Musta'an,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Sebelum saya lanjut, di meja Pimpinan ada Pak Melki mau bicara.  
Silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IX (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):**

Baik. Terima kasih, Ibu Felly.

**Bapak/Ibu Pimpinan, Teman-teman Anggota Komisi IX dan para mitra,**

Memang soal ini yang membuat Komisi IX makin merasa marah itu akibat ada pernyataan seolah-olah persoalan ini dilimpahkan Komisi IX yang salah. Jadi sudah ini naik sepihak.

Kemudian lagi ada komentar analisis (suara tidak jelas) itu *ngomong* di forum apa mengatakan bahwa ini akibat Komisi IX yang tidak mengerti hukum, Komisi IX yang tidak paham kebijakan, Komisi IX yang *sembrono* mengeluarkan rekomendasi di hasil rapat ini. Dan itu kami ketahui ternyata itu muncul melalui sebuah forum yang digagas oleh atau paling tidak ada keterkaitan dengan acara yang dibuat oleh pemerintah. Itu membuat marah semua Komisi IX. Dan tadi pagi juga kami secara internal membahas di Komisi IX sendiri dulu menyikapi pertemuan sore hari ini. Jadi tidak kurang-kurang ini Komisi IX terhadap kondisi ini. Ditambah lagi kalau lihat materi dari Pak Menkes, BPJS, DJSN dan Dewas ini kesan kami bahwa masing-masing jalan sendiri. Sudah mengetahui masalah sepelik ini, Menkesnya ke utara, BPJS-nya ke selatan dan Dewas dan DJSN juga tidak bisa kita tahu mau kemana urus barang ini.

Jadi memang kalau membahas masalah yang di intern pemerintah pun tidak selesai. Kita mau bahas apa. Masalah sudah serumit ini. Tapi kesan kami dari data dan juga bahan yang masuk ini kan kelihatan sekali bahwa memang tidak ada pembicaraan di intern pemerintah. Kemudian saling lempar tanggung jawab, Menkes bicara ke BPJS, BPJS bicara ke Menkes dan seterusnya. Dan memang tidak akan pernah selesai kalau kita model begini, karena kita mau membahas bersama-sama tapi kementerian sendiri dan *stakeholders*-nya ini tidak sama-sama dan tidak sejalan. Jadi kita bersepakat bersama di 2 September. Lanjut lagi rapat komisi berapa kali, kita bersepakat. Ini kebijakan politik ya, kita sepakat bahwa tidak akan naik. Prakteknya kan naik. Tapi akan kita siasati ini. Tapi kan cara mensiasati juga ternyata kelihatan sekali dari materi yang Bapak/Ibu kasih ini kepada kami ini tidak sama-sama duduk ini.

Dari dulu saya minta betul pada DJSN tolong ini dikorelasikan. Kalau DJSN sebagai perangkat yang harusnya bertugas konsolidasi semua pemerintah ini duduk bicara ya model begini, Pak. Karena masing-masing tidak mau bola panas ini ke tangannya, kemudian lempar ke DPR, kan enak saja. Kita sama-sama sepakat di sini, ketika sudah di jalan lapangan ribut lemparnya ke DPR, kan enak *banget* pemerintah kalau model begini. Dan ini usulan dari Pak Menkes itu. Seperti Ibu Dewi sampaikan itu benar, usulan Menkes. Kita dulu usul opsi tiga.

Tadi saya ajak teman saya itu, teman Pak Saleh juga, Wakil Ketua Komisi VIII tadi ke sini itu, saya ajak persis ke sini, namanya Pak Ace. Saya bilang, "Pak Ace, tolong di Komisi VIII diperhatikan. Ini kami ribut gara-gara Kemensos tidak masuk ini". Jadi saya ajak Pak Ace ke sini biar menyaksikan kita punya rapat ini, biar juga Pak Ace *ngomong* sama Kemensos, kita *ngomong* sama Depkeu, biar cepat. Jadi jangan dibikin *ribet* begini, kita saling lempar tanggung jawab. Kan kalau kita duduk bersama lagi..., tapi ini sebelumnya dirapikan dulu ini, ajak lagi Kemensos, pemerintah, Menko PMK. Kan bisa kita duduk bicara barang ini. Ini bukan soal yang *ribet-ribet* amat juga, tapi jangan saling lempar tanggung jawab begini, rakyatnya kemudian dilemparkan ke DPR lagi salahnya.

Jadi saya setuju teman-teman kalau memang andaikata tidak jelas seperti ini duduk perkaranya, daripada kita berdebat juga, ini kan pemerintah belum bersepakat kalau model begini. Kita *stop* saja dulu, kapan kita rapat lagi. Tapi pemerintah duduk dulu, Pak Menkes, Dirut, kemudian DJSN sama Dewas duduk bersama, kemudian kalau perlu kita dengan Kemenko, Menkeu, dengan Mensos,

kita duduk lagi, kita lintas komisi. Jadi biar kita bicara itu satu kali selesai ya sudah, hari ini dan jangka panjang itu beres.

Hari ini kita berdebat soal iuran, tapi kan kementerian kan tidak sesama ini kan tidak selesai ini. Kita akan berulang-ulang terus model begini. Persoalan kita kan bukan cuma soal naik 19.000 ini. Tapi kan ada soal kepesertaan yang kita bicara data *cleansing*, itu kan juga kita tidak bicara. Jadi tolong cari yang komprehensif. Kalau memang ini tidak bisa kita dapat ya kita *stop* saja sudah, *stop* rapat kita saat ini juga. Tapi tolong DJSN tolong dipanggil duduk bicara cepat ini, Pak. Kan dulu kita sudah bicara. Jangan cuma mengkomunikasikan Pak, koordinasikanlah permainan ini. Kalau tidak ya jadi liar begini ini, masing-masing mau cari selamat, lemparnya ke DPR. Kita tidak mungkin diam, Pak. DPR semua ini jagoan semua, Pak. Jadi jangan sekali-sekali kesalahan DPR yang itu bukan masalah ada di DPR. Karena kalau semua hak DPR itu keluar bisa ribut ini.

Ini tadi kita baru diajari sama buruh. Buruh bilang, "Bapak/Ibu ini kan punya banyak hak yang tidak dipakai, BPJS sudah kayak begini". Masak kita disuruh menjawab buruh, kan tidak mungkin. Tapi buruh sudah tuntutan kita, jangan DPR diam untuk tidak pergunakan hak-hak yang dimiliki. Jangan sampai kalau kita model begini situasinya semua hak-hak DPR itu dikeluarkan, politik nasional tidak stabil lagi gara-gara urusan BPJS. Nanti Pak Menkes pasti pusing dan semua jajaran.

BPJS ini bisa muncul segala macam urusan, Pak. Pansus bisa, interpelasi bisa, semua bisa Pak, angket juga bisa. Kan ini banyak celah kalau mau dipakai. Jadi kalau bisa kita selesaikan dulu baik-baik. Intern pemerintah dirapikan cepat, kalau bisa jangan sampai seminggu. DJSN tolong ambil alih pekerjaan ini. Cepat selesai di intern kita Komisi IX, kemudian kita lintas dengan komisi lain. Jadi urusan ini juga cepat selesai, bukan soal yang rumit ini. Dan jelas kita bicara tidak naik itu kita coba cari penyelesaian teknis lapangannya yang jangan sampai terlalu lama. Urusan seperti ini kita berulang-ulang terus menerus ini, tapi sekaligus semua persoalan itu kita selesaikan dalam jangka panjang dan melibatkan banyak pihak yang memang harus berkepentingan mengurus ini, Kemensos, Kemenkeu dan juga Menko PMK.

Jadi ini yang bisa kami sampaikan, sehingga jangan kita berlama-lama, kita *stop* di sini. Tapi dengan rekomendasi tadi itu tolong pemerintah cepat membahas menyelesaikan, kemudian kita ketemu lagi di rapat berikut.

Terima kasih, Ibu Felly.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, saya akan menyelesaikan 5 yang sudah mengisi daftar hadir. Masih ada 5 penanya lagi.

Kami persilakan untuk Pak I Ketut, kemudian siap-siap Pak Yahya Zaini, Pak Imam Suroso, Pak Alifuddin dan Pak Haruna. Kami persilakan.

#### **INTERUPSI F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T.):**

Pimpinan, interupsi.

Saya dari tadi sudah angkat tangan tapi tidak diberi kesempatan.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan, dari tadi interupsi. Silakan

**F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T):**

**Pimpinan Komisi yang saya hormati,  
Teman-teman Anggota DPR dan mitra yang hadir di tempat ini,**

Hari ini kita tidak sedang mencari popularitas, tetapi kami capek sebagai Anggota DPR dianggap tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah bekerja. Semua kesimpulan/keepakatan yang sudah ada, yang sudah dibuat, itu dilangkahi. Yang menjadi sasaran kami adalah wakil rakyat. Ketika kami pulang kemarin, kami dianggap hanya duduk di DPR yang 5D (duduk, diam, dengar, duit), cuma itu, tanpa ada sebuah aksi yang kami buat. Dan hari ini saya mendapat sebuah materi dari Pak Menkes. Sebelum saya lanjut saya mau tanya, ini materi memang dibuat dari Bapak Menteri? Ini bukan materi yang ilegal? Jelas dari Menteri Kesehatan?

Oke, baik. Saya mohon penjelasan sebentar pada halaman 3, ini ada kutipan tentang BPJS Kesehatan bahwa begitu hebatnya BPJS Kesehatan di sini bahwa tidak ada kementerian atau lembaga yang dapat mengendalikan, mengatur dan mengintervensi BPJS Kesehatan, kecuali ada penugasan khusus dari presiden. Ini maknanya apa? Sedangkan pada kesimpulan di sini dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi atas permasalahan utang klaim rumah sakit dan defisit BPJS karena sangat membutuhkan transparansi dari BPJS Kesehatan untuk mengungkapkan masalah keuangan yang terjadi di dalam BPJS Kesehatan. Tetapi di sini sudah dibatasi bahwa BPJS Kesehatan itu tidak bisa diutak-atik. Kalau memang hari ini ternyata tidak ada relevansi BPJS Kesehatan dengan kami (DPR) mendingan kita tidak usah rapat saja. Saya belum selesai bicara. Kalau memang sudah tidak ada relevansinya dan BPJS Kesehatan tidak bisa tersentuh mendingan kita *stop* saja rapat ini, kita bahas yang lain. Karena apa? Energi kita, kita mau berpikir untuk apa yang untuk rakyat ke depan dengan mitra-mitra kita, bukan hanya menyelesaikan persoalan ini. Ada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sejauhmana mengawasi semua kinerja dari mitra yang ada. Kalau hanya kita menghabiskan energi begini mendingan *stop* rapat, tidak usah rapat.

Itu dari saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya minta kalau yang akan menyampaikan nanti jangan ada yang diulang kembali

Kami persilakan Pak I Ketut, baru Pak Yahya. Kami persilakan.

**F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):**

Saya jadi *ngeri* juga melihatnya begini. Pada intinya kalau memang sudah tidak mampu lagi sebagai pengurus BPJS mundur saja, itu saja. Karena begini, kemarin kita sudah baik-baik, rapat pertama baik sekali, dikasih solusi alternatif sudah baik sekali. Tetapi sekarang berkelit bahwa BPJS itu seperti lembaga independen yang hanya dari presiden. Ini aneh. Ini negara apa ini. Maka dari itu kalau sudah merasa tidak mampu mundur saja. Mungkin kepada Dewas ini sebagai penilaian. Kalau begitu kita tidak akan mau rapat. Untuk apa juga rapat, rekomendasi tidak dilaksanakan. Ini sebagai bahan evaluasi.

Saya kira itu saja, terima kasih, biar tidak panjang-panjang.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Silakan Pak Yahya Zaini, siap-siap Pak Imam Suroso.

**F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H. ):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat siat, salam sejahtera untuk kita sekalian.***

**Pak Menteri dan Dirut BPJS beserta DJSN,**

Sebenarnya teman-teman Komisi IX ini, walaupun mendapatkan aspirasi dan tekanan dari rakyat, semangatnya adalah ingin mencari solusi. Saya kira kita semua di sini adalah semangatnya mencari solusi. Rapat Kerja ini kan mestinya rapat yang diadakan pada Pukul 10.00. Tapi karena teman-teman melihat ada semangat yang luar biasa dari kita untuk mencari solusi, maka rapat ditunda menjadi Jam 14.00. Saya kira ini harus kita tangkap sebagai sebuah itikad baik. Tetapi itikad baik dari teman-teman Komisi IX nampaknya tidak bergayung sambut dengan pemerintah. Saya kira ini perlu digarisbawahi. Mestinya pemerintah sebelum datang ke tempat ini melakukan koordinasi sesama pemerintah, bahkan dengan Menko PMK sendiri. Karena apa? Kebijakan itu kalau tidak bisa dilakukan oleh kementerian kan ada atasannya.

Sikap pemerintah sudah jelas tetap menaikkan per 1 Januari 2020, khususnya untuk yang mandiri. Teman-teman di sini sejak awal ingin mencari solusi. Pak Menteri sudah memberikan solusi, tapi solusinya tidak bisa dijalankan. Jangan seolah-olah berbaik-baik di depan teman-teman Komisi IX tapi justru usulannya tidak bisa dilaksanakan. Karena usulan itu sama sekali menurut kami belum pernah dikonsultasikan dengan atasan dan menteri yang terkait lainnya, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, sehingga teman-teman mempertanyakan *leadership* Pak Menteri di sini. Jadi kalau begini cara kerja kita menyelesaikan persoalan bangsa, menyelesaikan persoalan rakyat, maka tidak akan ada jalan keluar.

Menurut saya, Pimpinan, barangkali persoalan semacam ini kalau tidak diselesaikan pada tingkat kementerian kita angkat ke atasnya. Kita bisa ada solusi melalui rapat bersama/rapat gabungan, supaya *clear*. Karena Pak Menteri ternyata tidak mampu untuk memberikan solusi kepada kita dan kita sangat kecewa dengan usulan yang disampaikan di dalam kesimpulan ini. *Kok* begitu cara menyelesaikan masalah, tidak memberikan solusi dan melempar persoalan ini kepada BPJS yang tidak transparan. BPJS itu kan diaudit oleh negara, oleh BPK, dimana ketidaktransparannya mungkin bisa dijelaskan juga di forum ini supaya tidak ada dusta diantara kita. *Kok* antara pemerintah saling melempar tanggung jawab, kan tidak dewasa cara berpikir seperti ini saya kira. Kementerian Kesehatan diaudit oleh BPK, BPJS kan juga diaudit oleh BPK, dimana ketidaktransparannya BPJS itu dimana? Ini malu kita pemerintah sendiri tidak ada satu bahasa kemudian disampaikan secara terbuka di depan DPR yang diketahui oleh rakyat seluruh Indonesia karena diliput oleh wartawan. Jadi rekomendasi saya, Pimpinan, kalau kementerian tidak bisa menyelesaikan masalah ini kita angkat ke tingkat yang lebih tinggi, rapat gabungan. Bahkan kalau perlu mengundang Menko PMK ke rapat ini bersama-sama dengan menteri yang terkait, baru kita bisa ada jalan keluar yang *clear*.

Beberapa solusi yang telah disampaikan teman-teman tadi, misalnya Mbak Ning tadi, kemudian Mbak Dewi, kalau perlu negara membiayai Kelas III mandiri itu semuanya ditanggung oleh pemerintah, dimasukkan kepada BPI. Jumlahnya tidak besar, cuma 20 juta orang. Kira-kira angkanya cuma 10 triliun setahun. Dibandingkan dengan anggaran infrastruktur yang ratusan triliun tidak ada artinya untuk rakyat Indonesia. 4 triliun ya per tahun, kecil itu.

Jadi yang dibutuhkan di sini adalah itikad baik kita. Bukan persoalan teknis hitung-hitungan, tapi masalah itikad baik untuk membela rakyat. Kita semua di sini sudah kunjungan ke Dapil masing-masing, kita sudah merasakan betapa kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Terus terang saja, Pak Menteri dan Pak Dirut, Ibu saya sakit sekarang di Rumah Sakit dr. Sutomo. Kalau mengikuti aturan melalui rujukan yang berjenjang tidak akan sampai ditangani oleh dokter. Tetapi karena saya tidak tahu saya konsultasi kepada teman yang ada di rumah sakit. Kata teman-teman di sana kalau ingin cepat tidak perlu rujukan, langsung masuk IGD saja. Itu yang saya lakukan. Artinya apa? Sistem rujukan itu tidak *visible* untuk diterapkan dan dipertahankan. Jadi masih banyak persoalan-persoalan lain yang perlu kita lakukan kajian secara mendalam. Tapi persoalan yang utama sekarang adalah persoalan selisih tadi yang diperbincangkan oleh teman-teman.

Jadi sekali lagi saya garisbawahi, saya setuju dengan teman-teman kalau tidak bisa dicarikan jalan keluar ya diakhiri saja rapat ini saya kira. Saya setuju, Pak.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Kami persilakan Pak Imam Suroso, siap-siap Putih Sari dengan Ibu Intan Fauzi.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Terima kasih, Ketua dan Teman-teman Komisi IX.

**Yang saya hormati Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN dan Hadirin semuanya.**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua.***

Jadi teman-teman Komisi IX sudah kecewa semua, sudah disampaikan Pak Menteri, disampaikan, didengar Pak Menteri dan jajarannya, sudah mengerti *lah*, sudah 86. Saya minta apa yang disampaikan hasil dari Dapil tersebut diresapi oleh pemerintah. Siapa pemerintah itu? Ya Menkes itu sama BPJS yang sangat bertanggungjawab kepada rakyat yang sedang mengeluh ini.

Saya hanya sedikit menambahi pertanyaan teman-teman saja. Kenapa Pak Menteri Kesehatan kita sudah rapat berkali-kali, berulang-ulang, bahkan sampai Jam 04.00 pagi *kok* tidak dilaksanakan, ingkar janji. Itu kendalanya apa sampaikan ke kita, siapa tahu kita nanti bisa merumuskan. Kendalanya apa?

Kemudian kalau lihat dari jawabannya di sini dari paparan Pak Menteri sepertinya sudah lemas, sudah loyo, sudah angkat tangan, tidak punya solusi lagi. Kalau pemerintah sudah begini matilah kita, mati rakyat.

Kemudian yang ketiga, ini yang ditanya di Dapil itu, misalnya suami/istri anaknya tiga, mereka kadang kerja kadang tidak kerja, mereka harus ikut BPJS semua, BPJS yang Kelas III pun naik. Itu kan sama dengan..., mohon maaf, menurut saya membunuh pelan-pelan itu. Itu jangan sampai terjadi itu.

Tadi ada usulan dari Ibu Ning juga menurut saya setuju, misalnya Kelas III itu diborong oleh pemerintah. Swasta maupun negeri (RSUD) itu ada *lah*. Saya setuju juga Ibu Ning, yang orang kaya/orang mampu dia gengsi dilihat tetangganya *kok* Kelas III, pelit amat, dia takut itu, makanya dia mesti ikut yang Kelas I, yang Kelas II mesti ikut. Yang memang mereka tidak mampu/orang miskin sudah mesti Kelas III, "Memang *gua* orang miskin". Itu menurut saya bagus sekali itu, kita Komisi IX akan mengawalinya itu.

Saya tidak panjang lebar. Jadi kalau memang Pemerintah yang notabene Pak Menkes, DJSN yang perwakilan kita dan BPJS belum klop, ini kan belum klop ini, kita pending saja, Ibu Ketua. Setelah dipending, beliau sudah klop sama-sama dengan kita DPR RI, wakil rakyat. Katanya pemerintah kan membela rakyat ini. DPR jelas membela rakyat, *wong cilik* terutama, orang miskin tidak mampu, itu sudah klop, sejuk, kita main lagi.

Pak Menteri dan Pak Fahmi perlu ingat bahwa *sampeyan* pengguna anggaran sesuai Undang-Undang MD3. Saya ini *owner*, wakil rakyat, permintaan kita *kok* tidak dituruti. Kalau saya punya karyawan begitu perintah *owner* tidak dilaksanakan, mohon maaf, *tak* pecat Pak. Ini kita masih ada kebijakan baik dari *owner* yang punya uang rakyat, kita yang sesuai undang-undang yang memiliki, laksanakanlah pemerintah. Apa sulitnya. Anggaran kurang bisa dimainkan yang lain-lain. Kita kan kaya raya itu, Pak Menteri. Apalagi..., mohon maaf, Pak Menteri kan Letnan Jenderal itu, pikirannya itu mesti untuk rakyat ini. Perang untuk apa, untuk rakyat. Merdeka untuk apa, untuk rakyat.

Sementara itu, Pak Ketua dan Pak Menteri.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Silakan, Ibu Putih Sari. Setelah ini Pak Alifuddin.

**F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Saudara Menteri Kesehatan beserta jajaran, dan  
BPJS, DJSN, Dewan Pengawas, semua yang hadir,**

Saya kira sudah banyak panjang lebar disampaikan oleh para pendahulu rekan-rekan Komisi IX *reasoning*, kronologis, kenapa hari ini semua mengungkapkan kekecewaan. Memang awalnya kita mengagendakan rapat pada siang hari ini ingin mendapatkan kejelasan kenapa rekomendasi yang awalnya

ditawarkan sendiri oleh pemerintah tidak bisa dipenuhi sendiri juga oleh pihak pemerintah. Ini saya rasa dari bahan yang sudah diberikan tidak perlu lagi kita mendengarkan penjelasan, karena sudah jelas tertulis/tertera di dalam bahan yang diberikan kepada kami Komisi IX bahwa pemerintah belum bisa menjalankan solusi yang ditawarkannya sendiri yang sudah disepakati. Kami menerima tawaran solusi yang sudah diberikan oleh pemerintah sendiri.

Jadi konkret dan langsung saja saya kira, Pimpinan, tidak lagi berpanjang lebar. Kalau apa yang sudah menjadi kesepakatan di forum komisi tidak bisa dijalankan, saya sepakat dengan tadi Pak Yahya ataupun Ibu Dewi, kita gunakan hak kita yang lain untuk meningkatkan rekomendasi ini ke depan didalam rangka perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional ke depan, apakah membentuk pansus ataupun menggunakan hak-hak kedewanan kita, hak interpelasi dan sebagainya.

Untuk kita sama-sama tidak ingin mencari kesalahan atau melempar kesalahan seperti yang hari ini terjadi antar lembaga kementerian yang ada di depan kita hari ini, BPJS melempar tanggungjawab juga ke Kementerian Kesehatan begitu, sehingga tentu untuk kita bisa meningkatkan apakah keputusan kita membentuk Pansus atau tidak mungkin kita bisa memberikan waktu kepada fraksi-fraksi untuk juga berkonsultasi kepada fraksinya masing-masing setelah ini. Jadi saya kira tidak perlu lagi dilanjutkan rapat kita pada sore hari ini, karena kita sudah sama-sama tahu hasil apa yang akan disampaikan.

Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Kami persilakan untuk Pak Alifuddin, setelah itu Ibu Intan Fauzi. Kami persilakan.

#### **F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.***

Sudah banyak teman-teman mengungkapkan keluhannya dan kesimpulannya rapat tidak dilanjutkannya. Kami pun mengalami hal yang sama. Karena seperti kemarin kita menerima dari kepala daerah bahwa dalam APBD 2020 belum dimasukkan/belum ada dananya untuk kenaikan 19 ribu. Maka usul konkret kami sebagaimana teman-teman kami yang lain bagusnya tidak ada APBD tetapi semuanya menjadi APBN. Dan juga tidak ada mandiri-mandirian lah, bagaimana semuanya dibayar oleh negara. Ini tugas Badan Anggaran, Mbah Imam Suroso, karena ini menjadi hak, sehingga kita tidak melihat lagi rakyat yang banyak di daerah yang dari APBD karena uangnya terlambat BPJS mematikan, istilahnya *distop* keanggotannya, sedangkan ingin berobat. Inilah yang kejadian di masyarakat dari APBD. Karena pihak Pemda terlambat membayar akibatnya anggotanya terhapus, akibatnya tidak bisa berobat. Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat Kalimantan Barat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Jadi dari bahan yang kami terima memang sebaiknya rapat dibuat *schedule* baru agar ada kesepakatan dari Kementerian Kesehatan, BPJS, DJSN dan Dewan



Pengawas, sehingga memberikan informasi yang membahagiakan. Sebab ini sangat sungguh terlalu, Pak. Istilahnya sangat menyedihkan *lah*.

Untuk itu dari kami cukup sekian, karena kalau kepanjangan pun intinya adalah takutnya saya sangat terbawa emosi juga, jadi bagusya mengungkapkan apa yang sudah disambungkan, berarti sudah tersambungkanlah yang saya perlu salurkan.

Lebih kurang mohon maaf.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Kami persilakan Ibu Intan Fauzi, kemudian siap-siap Pak Haruna.

**F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M.):**

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi IX.

**Yang terhormat Pak Menkes, Dirut BPJS Kesehatan, Dewas, Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta jajaran,**

Sebetulnya rapat antara kami dengan mitra ini harusnya sudah maju, ini sudah masuk pada Januari 2020. Kami berharap pembicaraan kita adalah lebih kepada program kerja dan anggaran kementerian dan lembaga, karena ini menyangkut masyarakat. Salah satu contoh adalah pada saat banjir kemarin, saya mengulas sedikit, Dapil saya adalah Kota Bekasi dan Kota Depok, Kota Bekasi adalah wilayah terdampak yang paling besar dengan 60 kelurahan terdampak, jumlah pengungsi terbesar se-Jabodetabek dengan tinggi banjir 6 meter, sehingga itu yang paling tinggi. Saya pada saat terjadi banjir ke lokasi dan melakukan koordinasi dengan Kemenkes, antara lain saya kontak Pak Sekjen dan lain-lain, dilempar ke pusat krisis kesehatan tidak ada hasil. Artinya dari situ saya bisa melihat bagaimana kinerja dari Kementerian Kesehatan. Artinya begini Pak, mungkin ada di lapangan orang-orang Bapak, tapi jangan saya menyuruh TA, saya langsung berkoordinasi dengan semua jajaran di Kemenkes, Pusat Krisis Kesehatan dan lain-lain, tidak ada *feedback* kembali kepada saya, saya meminta apa yang bisa kalian bantu untuk rakyat yang sedang terdampak banjir. Dan saya bisa menyandingkan itu dengan mitra komisi saya sebelumnya, mohon maaf ini terpaksa saya ungkapkan, walaupun saya sudah tidak di komisi itu pada periode lalu, tapi mereka langsung menurunkan orang/langsung menurunkan bantuan. Karena yang terdampak ini adalah rakyat. Itu adalah salah satu contoh.

Hari ini kita mengulang lagi bicara masalah BPJS Kesehatan. Kenapa teman-teman disini marah, antara lain adalah tadi sudah disebutkan, polemik dari Direktur Pusako yang isinya seragam, hampir seluruh media. Saya rasa ini adalah *press release*, karena isinya seragam bahwa rekomendasi DPR berpotensi melanggar hukum. Kalau bicara rekomendasi DPR, sesuai dengan kesimpulan Komisi IX dan pemerintah, dan juga ini dimasukkan di dalam paparan Dewas BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR RI mendukung langkah Kemenkes dan seterusnya. Artinya mendukung karena memang ini asalnya adalah dari Pak Menteri, jadi jangan kemudian diputarbalik di media. Kami ini adalah parlemen, *parle* bicara Pak.

Kalau mau kita *counter* lagi di media akan ramai, tapi bukan di situ tempatnya. Ini kita bicara masalah rakyat, sehingga sudah sepatutnya dikemukakan di sini, bukan kemudian menjadi polemik dilempar di media keluar.

Kemudian satu lagi, telaahan yang masuk hari ini paparan dari Kemenkes, BPJS Kesehatan dan semua ini seakan-akan mendukung bahwa memang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Contohnya adalah dari halaman pertama sampai halaman terakhir Pak Menteri Kesehatan, halaman kedua *BPJS Kesehatan tidak di bawah kendali Kementerian Kesehatan*. Betul Pak, tapi Kemenkes adalah regulator, BPJS Kesehatan adalah operator. Di situ peran dari regulator. Kemudian jawaban dari Menkes tertanggal 27 Desember 2019 itu jelas tertulis. Artinya kenapa kemudian itu tidak dibahas lebih lanjut. Dan juga ada halaman terakhir, halaman 4, sangat membutuhkan transparansi dari BPJS Kesehatan untuk mengungkap masalah keuangan yang terjadi di dalam BPJS Kesehatan. Artinya secara interpretasi ini ada masalah keuangan. Kenapa tidak dibicarakan/dikoordinasikan antara pemerintah? Dan dari halaman pertama sampai terakhir tidak ada satupun solusi bagaimana dengan rekomendasi yang kita buat bersama kesimpulannya untuk rakyat bahwa Kelas III mandiri itu tidak naik.

Dan kalau kita bicara lagi kenaikan iuran untuk yang karyawan ada kenaikan 5 persen. Tadi buruh ke sini, antara lain adalah poin pertama yang mereka ungkap, walaupun tidak dielaborasi lebih panjang, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenapa mereka menolak? Karena sebetulnya ini adalah dibayar oleh pemberi upah, karena di situ ada 1 persen yang mereka harus keluarkan. Sudah UMP tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, ditambah 1 persen lagi sekarang potongan dan itu ada kenaikan. Dan sebenarnya kalau belajar dari BPJS Ketenagakerjaan mereka bisa mengelola, karena otomatis setiap tahun itu yang namanya gaji itu naik. Artinya itu bisa dikelola. Kemudian kita bicara lagi dari negara-negara maju, tidak ada satupun *national health security* yang bersumber hanya satu-satunya tumpuan dari retribusi. Tapi itu ada dari perpajakan, ada dari asuransi swasta, asuransi sosial dan lain-lain. Tapi yang terjadi sekarang adalah BPJS Kesehatan dengan 5 persen misalnya UMP DKI adalah 4,3 juta, saya pembulatan keatas ya Pak 4,267, artinya di situ sudah hampir menyamai dengan perbulannya asuransi kesehatan swasta sekitar 200 ribuan. Apakah ini tidak bisa dikelola dengan baik. Kalau mereka klaim, yang diklaim itu mau Kelas I, Kelas II, berobat jalan, itu sama fasilitasnya, tidak ada yang berbeda. Dan paparan BPJS Kesehatan dasarnya bahwa dasar hukum pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan melanggar yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (Undang-Undang BPJS). Saya langsung kepada ayat (3). Ayat (3) di sini disebutkan bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan... dan seterusnya... diatur dalam PP.”*

Kemudian di sini di halaman 7 disebutkan lagi PP apa saja penggunaan aset dana jaminan sosial dapat dilakukan untuk a, b, c. Kesimpulannya kenapa kemudian dikatakan itu limitatif? Artinya begini, kalau ada biro hukumnya mari Pak kita berargumentasi, kata *dapat dilakukan* itu bukan limitatif. *Dapat dilakukan* itu adalah dapat dilakukan untuk a, b, c, artinya interpretasinya selain itu justru dimungkinkan, artinya ini adalah fakultatif. Kalau limitatif itu kalimat PP-nya adalah *hanya untuk*, itu artinya limitatif, sehingga menurut saya apa yang dimuat di media ini memang sudah dipersiapkan betul ini oleh BPJS Kesehatan bahwa tidak bisa dilakukan. Menurut hemat saya sebetulnya akan lebih bijak kalau pemerintah

mencari jalan keluar untuk bagaimana masyarakat ini tidak terbebani, bukan membuat polemik dengan segala aturan dan sebagainya yang ternyata juga interpretasinya menurut saya tidak seperti itu.

Jadi sekali lagi supaya kita tidak berjalan di tempat, kita bicara program yang lebih besar, antara lain adalah misalnya yang lalu kita sudah bicara serapan anggaran, antara lain misalnya Ditjen Farmalkes, serapan anggarannya sampai dengan *year on year* sangat tidak mungkin untuk menyerap 100 persen. Ini tidak ada jalan keluarnya sampai sekarang, mundur lagi kita bicara BPJS Kesehatan, sehingga menurut saya ini apa memang disengaja atau bagaimana?

Saya yakin Pak Menkes, Pak Dirut dan lain-lain ini sudah bisa membicarakan rakor koordinasi. Tentunya juga bisa arahan dari Pak Presiden bagaimana permasalahan kesehatan. Karena kita kembalikan lagi, undang-undang ini sudah capek kita semua bicarannya, balik lagi Undang-Undang Dasar, balik lagi undang-undang. Tidak boleh ada pasien yang ditolak. Itu adalah hak rakyat untuk mendapatkan kesehatan yang layak.

Terima kasih.

***Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Kami persilakan Pak Haruna. Setelah Pak Haruna, Pak Abidin.  
Kami persilakan.

**F-KB (H. HARUNA):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,***

**Yang kami hormati Ibu Ketua, Teman-teman dan Pak Menteri dengan seluruh jajarannya,**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Saya *simple*, Ibu Ketua. Ini kemarin, ini untuk BPJS, yang memberikan saran itu saya sendiri bahwa apakah IT Bapak tidak bekerja atau tidak mampu mengerrorkan Kelas I dan Kelas II untuk tidak turun. Terjadi tadi dari teman-teman informasi turun 800 ribu lebih per Indonesia. Itu yang pertama Pak, karena ini sudah banyak pertanyaan.

Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan kembali dikaji ulang itu aturan berjenjang? Kita kembali ke 2017, 2017 ke bawah tidak pernah ribut. Sekarang Bapak tidak lihat, di Puskesmas itu sampai antrian 100. Kalau orang tidak tahu aturan seperti ini dan konyolnya lagi orang yang tetangga di ruangan rumah sakit harus pergi cari jenjang itu sampai bayar 40 ribu-50 ribu. Jadi 100 ribu pergi pulang. Kita kan sudah ada pengalaman, 2017 ke bawah tidak pernah ada kasus. 2018 aturan berjenjang banyak yang komplain.

Saya kira itu Pak, dua. Pertama tadi kami tanyakan itu IT BPJS berjalan atau tidak atau mampu atau tidak. Kemudian aturan berjenjang 2017 dikembalikan seperti sedia kala. Saya kira itu dua pertanyaan minta nanti jawaban dari BPJS.

***Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Kami persilakan untuk Pak Abidin.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Felly Estelita Runtuwene.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**Pimpinan/Anggota Komisi IX yang kami hormati,  
Tamu undangan, Kementerian Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, DJSN,**

Tadi saya dengar rapat ini dihujani interupsi sebelum dimulai dan belum dibuka. Tapi tidak apa-apa, artinya bahan-bahan sudah diterima oleh kita semua, sehingga langsung respon. Sore ini menarik di paparan Menteri Kesehatan disebutkan dengan lengkap, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. dr. Terawan Agung Putranto, S.P., R.A.T (KRI). Dulu Pak Jokowi mengumumkan sebagai menteri tidak lengkap semacam ini. Saya senang dicantumkan ada Letnan Jenderal. Saya tahu maksudnya, beliau-beliau memang sungguh-sungguh ingin bekerja.

Pimpinan, kalau dilihat dari paparan yang belum disampaikan oleh Menteri Kesehatan sepertinya sudah jelas bahwa apa yang diharapkan dari kita semua untuk menjawab temuan, keluhan, baik melalui telepon, SMS, kepada kita semua, terutama yang Anggota Komisi IX, walaupun komisi-komisi yang lain juga mengalami yang sama di-*forward* juga ke kita-kita, artinya ini sudah menjadi hal yang menyeluruh di beberapa daerah terjadi keresahan. Kalau dilihat dari jawaban paparan sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditindaklanjuti kesepakatan yang memang diusulkan oleh menteri sendiri. Ada tiga alternatif kalau tidak salah ingat yang ditawarkan, lalu kita sepakat dengan alternatif yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tapi saya menganut paham bahwa politik itu tidak ada jalan buntu, jadi selalu ada jalan keluar. Kalau jalan buntu berarti kita namanya tidak berpoltik. Masih ada jalan. Jalannya apa? Karena kewenangan itu diletakkan kepada presiden, seperti yang disampaikan di halaman 3 yang belum disampaikan, tadi ditayangkan sejenak, sebenarnya masih ada jalan, ya ke presiden. Tentu bagaimana caranya agar bisa sampai ke presiden. Ada dua cara. Yang pertama, melalui rapat-rapat terbatas atau rapat kabinet yang dalam hal ini Pak Menteri tentu akan menyampaikan itu bahwa apa yang terjadi sekarang di masyarakat tentang kedudukan dari Perpres yang mengatur tentang di dalamnya kenaikan dari iuran itu menimbulkan kesulitan dari rakyat. Saya masih optimis itu bisa dilakukan, Pak Menteri. Yang kedua, jalan parlemen. Jalan parlemen tadi sudah disampaikan. Tapi saya yakin ini tidak akan sampai meruntuhkan republik ini, karena Pak Presiden pun juga berpikir untuk rakyatnya. Tidak akan mungkin menyengsarakan rakyat.

Ada juga yang perlu sebagai upaya katakanlah sampai ke presiden. Pak Menteri juga menyampaikan juga bahwa BPJS juga harus, di halaman 4, ditekankan juga agar masalah keuangan yang di dalam BPJS Kesehatan itu juga harus ada penyelesaian juga. Ini kan dramatisasinya, kalau dikatakan ini dramatisasi ya, rakyat itu selalu mempertanyakan ini bagaimana iurannya sekian, direksinya gajinya sekian. Itu yang mereka pahami, Pak. Kita tidak boleh

menghindar itu, itulah yang ditanyakan. Sebenarnya kerja yang mandiri itu adalah *automatically* kalau kepesertaan di BPJS itu memang kerja dari BPJS yang mandiri itu sebenarnya. Kalau yang PBI, yang TNI/Polri, PNS pusat, itu kan sudah *automatically* menjadi peserta BPJS Kesehatan atau juga yang dibiayai oleh APBD. Saya kira kinerja dari BPJS Kesehatan pun juga harus menjadi catatan.

Selanjutnya kemarin kita mengundang Asosiasi Walikota dan Bupati Seluruh Indonesia, juga DPRD, juga Asosiasi Rumah Sakit dan lain sebagainya, masih banyak kerumitan-kerumitan yang ditemui berkaitan dengan kenaikan itu. Kenapa? Karena pembahasan APBD-nya sudah selesai, jadi tidak mungkin katakanlah kenaikan itu ditanggung oleh APBD sementara pembahasan APBD nya sudah selesai. Sehingga jalan keluarnya mereka mengurangi kepesertaan itu, dan itu menimbulkan masalah. Karena kalau tidak itu katanya BPJS akan memutuskan kalau tidak dibayarkan.

Hal-hal inilah saya kira yang perlu diterobos ini. Tidak mungkin penyelesaian ini dengan jalan normal, Pak Menteri. Ini harus ada *special treatment* dalam waktu cepat agar tidak kemana-mana ini. Saya berkeyakinan ini bukan lagi soal teknis, itu diselesaikan, berbarengan diselesaikan, tapi soal yang terjadi sekarang adalah harus dijawab oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan sebagai regulator, dalam hal ini adalah presiden, untuk melakukan terobosan.

Keputusan politik itu memang harus mengabaikan hal-hal yang teknis-teknis itu. Tapi bukan berarti teknis itu tidak diselesaikan, harus diselesaikan. Saya tidak tahu ini, mudah-mudahan Pak Menteri dengan tangan yang menyatu di hidungnya ini sungguh-sungguh memikirkan. Saya yakin itu Pak Menteri itu juga, "Pasti saya pulang dari sini harus ke istana harus ketemu Pak Jokowi ini." Saya mengartikan saja apa yang dipikirkan oleh Pak Menteri, karena saya yakin Pak Menteri itu komitmennya. Karena usul itu dari beliau yang memang menurut beliau itu bisa dijalankan.

Kita butuh lagi keputusan politik dari Pak Menteri, sampaikan ke Pak Presiden bahwa kerumitan terhadap Perpres itu di lapangan banyak hal yang harus diterobos. Karena rapat ini belum dibuka..., sudah dibuka ya?

**KETUA RAPAT:**

Sudah dibuka, rapat ini sudah dibuka, diberikan kesempatan kepada Pak Menteri. Tapi ada interupsi dari bawah untuk kita.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Sudah dibuka tapi interupsi? Karena Ibu Fell yang membuka, Ibu Felly juga yang menutup.

**KETUA RAPAT:**

Kami tawarkan sampai Jam 17.00? Atau Jam 16.30? 16.30

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Saya lanjutkan. Sebenarnya saya di ujung ini tadi sudah di ujung. Walaupun sudah dibuka oleh Ibu Felly, saya menduga tadi belum dibuka Ibu Felly. Mohon

maaf saya salah dalam apa, karena interupsi ya dari teman-teman. Saya kira tidak perlu lagi dilanjutkan rapat ini, karena pun jawabannya sudah. Kecuali di luar jawaban yang sudah kita terima. Artinya, "Baik, para Anggota Komisi IX dan Pimpinan yang terhormat, saya selaku Menteri Kesehatan, karena rapat ini tidak bisa dimulai karena Komisi IX menganggap bahwa bahan-bahan sudah dibaca dengan baik dan diputuskan untuk tidak dilanjutkan, silakan ditutup dan saya akan langsung menghadap presiden." Saya kira begitu, Pak Menteri. Oleh karena itu mohon ditutup pada sore ini.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Kami persilakan Pak Nabil, setelah ini Ibu Ruskati.

**F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**Merdeka!**

Sebenarnya panjang sekali yang ingin kami sampaikan, cuma *alhamdulillah* sudah diwakili oleh teman-teman di Komisi IX.

Saya ingin menyoroti terkait apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tentang isu ini. Saya menduga bahwa BPJS Kesehatan kemudian meng-*hire* analis atau apa itu kemudian untuk memainkan isu ini di media.

Jadi begini, Pak Dirut, kalau kita ingin berdebat di ruangan ini. Jangan pindah medan pertarungan di luar. Kalau Anda pindah medan pertarungan di luar, kami bisa lebih gila lagi. Jadi kita berdebat di sini, beradu di sini.

Kemudian saya melihat paparan Dewas juga aneh. Kenapa Dewas tidak *ngomong* dari kemarin kalau ini berpotensi melanggar hukum. Aneh sekali, kenapa tidak *ngomongnya* dari kemarin. Apakah Anda niat untuk mempermalukan kami? Dan suara rakyat sudah terkanalisasi dengan baik, disuarakan melalui forum seperti ini dengan cara-cara terhormat. Namun rupanya hasil kesimpulan Komisi IX tidak dijalankan, yang itu artinya adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Dan soal BPJS Kelas III adalah soal keberpihakan. Di mana negara mau berpihak, pemerintah mau berpihak? Kalau mau berpihak kepada soal keuntungan, kalau kata Mbak Ning ya diubah saja, tidak usah jaminan sosial, asuransi atau apa.

Dan di awal-awal ketika Pak Menteri Kesehatan ini dilantik oleh presiden banyak dipuji, katanya Pak Menteri ini banyak terobosan-terobosan. Kemudian presiden menyampaikan bahwa Pak Menteri ini sudah punya jurus-jurus ampuh untuk mengatasi solusi kenaikan tarif atau premi ini. Dan saya *haqqul yaqin* tiga alternatif ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri kepada presiden, sehingga sampai presiden bilang ini jurus ampuh, jurus jitu. Tapi *memble* juga ini, tidak jelas. Jadi menurut saya mental-mental para pejabat inilah yang harus direvolusi, jadi supaya betul-betul revolusi mental itu terjadi. Saya sudah tidak kuat terus terang.

Kalau melihat di pemerintah daerah itu sebenarnya banyak sekali yang cerdas-cerdas bisa kemudian mengambil langkah-langkah taktis untuk menyiasati,

kemudian mengambil langkah-langkah bagaimana masyarakat bisa berobat dengan gratis dan lain sebagainya, dan banyak yang sukses. Itu di daerah-daerah yang mohon maaf kewenangannya terbatas, sementara yang di pusat begini. Ini mainan apa lagi ini? Jangan-jangan kami ini Komisi IX hanya disibukkan urusan BPJS Kesehatan supaya kita tidak tahu ada permainan-permainan lain yang sedang dimainkan oleh pemerintah. Ini nanti di forum lain akan dibuka oleh teman-teman ini. Jadi kami dari Komisi IX sudah menghormati pemerintah, menghargai Perpres supaya tidak batal, artinya tetap naik, dan kita menyetujui solusi yang ditawarkan oleh Pak Menteri Kesehatan, tapi lagi-lagi kita tahu *lah*.

Kalau soal kami dikritik, dicaci maki oleh rakyat kami tidak bekerja, tidak ada masalah Pak. Yang penting rakyatnya sejahtera, rakyatnya sehat bisa berobat dengan gratis mendapatkan haknya. Dan Bapak-bapak ini, Saudara Menteri Kesehatan, Saudara Dirut BPJS Kesehatan, dan yang lain ini adalah panglima atau komandan di tempatnya masing-masing. Dan panglima itu harus ksatria, tanggungjawabnya harus ditunjukkan. Jangan main lempar-lempar begitu. Apalagi Pak Terawan ini tentara, mana ada lempar tanggung jawab.

Terakhir yang ingin saya sampaikan, jika Bapak-bapak yang ada di depan saya ini, mitra-mitra kerja ini, kira-kira masih sanggup untuk menjadi pejabat ya dilanjutkan dan beri solusi yang jelas untuk rakyat. Tapi kalau tidak, silakan anda mundur secepatnya sebelum dipermalukan oleh rakyat.

***Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Kami persilakan Ibu Ruskati, setelah ini Pak Obon.

**F-GERINDRA (Dra. H. ANDI RUSKATI ALI BAAL):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Terima kasih, Pimpinan.

Cuma sebentar saya menyampaikan pesan dari salah satu direktur rumah sakit yang ada di Dapil kami. Saya hubungkan dengan yang disajikan kepada kami halaman 4 bahwa pembayaran utang klaim rumah sakit dan penanggulangan defisit dana jaminan sosial, kemudian Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi atas permasalahan utang klaim rumah sakit dan defisit DJS karena sangat membutuhkan transparansi dari BPJS Kesehatan untuk mengungkapkan masalah keuangan yang terjadi di dalam BPJS Kesehatan. Permasalahan ini tentunya kita semua tahu bahwa semua rumah sakit yang ada di Indonesia ini semua berteriak. Karena kita kaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 79 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit harus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Tentu kalau mau Badan Layanan Umum Daerah rumah sakit harus mandiri. Bagaimana rumah sakit mau mandiri sedangkan pembayaran BPJS 6 bulan, 8 bulan, sampai sekarang belum ada pembayaran. BPJS Kesehatan hanya dijanji sudah verifikasi 3 bulan, sampai sekarang belum ada.

Jadi kami mengharapkan kepada pihak Kementerian Kesehatan dan BPJS supaya ada perhatian. Karena di tahun 2020 ini rumah sakit yang ada, apalagi di

daerah kami yang ada di Sulawesi, biaya sarana, biaya jasa, itu sampai sekarang belum bisa dibayarkan. Jadi mohon kepada Kementerian Kesehatan ini dengan BPJS ada solusi untuk bisa ditindaklanjuti. Karena ini Peraturan Mendagri Nomor 79 Tahun 2018 haruslah dilaksanakan yang seperti itu. Karena ini sangat bertentangan bilamana tidak dijalankan dengan aturan Mendagri.

Jadi sekali lagi kepada Bapak Menteri dan juga dari BPJS ada perhatian, karena 2020 ini juga banyak permasalahan di rumah sakit. Harus beli obat, harus bayar listrik, harus bayar honor PTT dan banyak lagi yang harus diselesaikan di rumah sakit. Sedangkan ada 6 bulan sampai sekarang tidak ada pembayaran. Itu besar sekali, 3 sampai 5 miliar yang harus dibayarkan di tahun 2019.

Kita kembali ke tahun 2020, tentu permasalahan meningkat lagi. Jadi mohon kepada kementerian ini. Kalau kita lihat kantor BPJS yang ada di daerah itu semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tentu BPJS ini pasti masih banyak yang disimpan-simpan barangkali anggaran yang ada di BPJS, karena sampai sekarang tidak ada solusi yang kami bisa sampaikan kepada direktur yang ada di daerah kami.

Hanya itu usulan kami.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, kami persilakan Pak Obon.

#### **F-GERINDRA (OBON TABRONI):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**Ibu Pimpinan yang saya hormati,  
Sahabat-sahabat Komisi IX yang saya banggakan,  
Tamu undangan, Bapak Menteri, Direktur BPJS dan lain-lain yang tidak bisa  
saya sebutkan satu persatu,**

Saya menyampaikan hanya untuk Direktur BPJS, karena yang lain saya rasa sudah cukup, masukan Pak Menteri juga sudah cukup. Yang pertama faktanya bahwa, ini khusus berkaitan dengan pekerja formal yang ter-PHK, tadi sudah disampaikan oleh si Ibu. Faktanya bahwa pekerja formal tingkat pembayaran iuran mereka itu paling tinggi kepatuhan pembayaran iuran. Karena mereka sebelum keluarganya menerima upah hasil kerja mereka, BPJS itu sudah potong duluan.

Yang kedua, fakta kedua, selain tingkat kepatuhannya tinggi, klaim rasio dari data kemarin PPU juga termasuk yang paling rendah. Karena tingkat derajat kesehatan atau ada faktor-faktor lain saya tidak paham. Tapi apa balasan yang diberikan? Saya mengatakan balasan yang diberikan kepada pekerja formal pada saat mereka ter-PHK. Jadi secara umum, ketika mereka ter-PHK, belum ada keputusan PHK, statusnya baru dari perusahaan menyatakan PHK, belum ada keputusan yang mengikat, tiba-tiba perusahaan memutuskan iuran. Karena perusahaan yang mempunyai akses, maka saat itu juga sudah di PHK, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan secara otomatis terputus. Mereka sulit untuk masuk PBI, karena masih berstatus sebagai pekerja. Yang tadi saya sampaikan, apa balasan, apa *reward* dari BPJS? Sudah patuh membayar iuran, kemudian yang



kedua sudah klaim rasionya juga rendah, tapi begitu PHK secara otomatis tidak dapat mereka pergunkan karena sistem sudah ter-*block*. Kemudian bagaimana setelah muncul surat keputusan PHK? Gambaran saja, Ibu, yang ini kita diskusikan dalam rencana revisi, itu proses PHK itu sampai keputusan mengikat itu bisa 3 tahun. Selama 3 tahun bagaimana mereka? Untuk hidup saja susah kemudian harus membayar iuran kesehatan. Dan mengurus PBI itu juga sulit.

Setelah mereka ter-PHK, muncul surat PHK, kalau tidak salah ada keputusan Perban, Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan kepesertaan, salah satunya PHK, Perban itu peraturan dari direksi, ketika ter-PHK mestinya secara otomatis di-*take over* oleh negara. Karena selama ini teman-teman pekerja juga membayar pajak atau yang lain-lain.

Lagi-lagi, jadi proses PHK-nya sudah *ribet*, kemudian setelah proses ter-PHK, yang semestinya setelah proses ter-PHK mereka itu di-*cover* oleh negara dengan PBI. Persyaratannya sangat luar biasa sulit. Bahkan di wilayah-wilayah itu justru direkomendasikan menjadi peserta Jamkesda. Jadi dari Dinsos merekomendasikan atau minta saja menjadi peserta Jamkesda. Kalau bicara Jamkesda, tiap wilayah kemampuannya berbeda-beda. Apalagi dengan kenaikan iuran BPJS. Lagi-lagi, karena dianggap mampu, kemudian mereka masuk peserta Jamkesda sulit, pada saat proses ter-PHK mereka tidak mendapatkan layaknya hak yang menurut aturan undang-undang mestinya setelah mereka ter-PHK mereka mendapatkan hak tersebut sampai nanti 6 bulan kemudian bekerja lagi, dan yang lain-lain.

Intinya saya mohon, tadi harus ketemu dengan presiden kaitan dengan iuran, kemudian yang lain-lain, Perban adalah produk murni yang dilakukan oleh Direksi BPJS, tolong itu diperbaiki Pak. Karena peserta BPJS yang tercatat, dari 55 juta pekerja formal mereka kan baru sekitar 35 jutaan yang baru tercatat, kurang lebih sekitar 35 jutaan. Dan mereka disebut kaya juga tidak, kemudian disebut miskin juga tidak, tapi begitu PHK mereka mengalami beban dua kali lipat dari beban yang ada.

Saya mohon, lagi-lagi ini tidak perlu konsultasi ke presiden, tidak perlu segala macam, cukup direksi kumpul ketemu Dewas-dewas yang ada perbaiki persoalan buruh yang ter-PHK.

Terima kasih.

***Billaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Di sebelah kiri saya, silakan Pak Darul Siska.

**F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Terima kasih Ibu Ketua.

**Para Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Pak Menteri, DJS dan segenap jajaran,**

Saya mau datang ke hal yang sangat prinsip saja. Kita ada di ruangan ini mau membicarakan jaminan sosial kesehatan adalah karena undang-undang. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu mengeksekusi undang-undang ini apa tidak? Karena kan eksekutor undang-undang adalah pemerintah. Apakah pemerintah mampu mengeksekusi undang-undang apa tidak? Kalau tidak mampu, maka harus dinyatakan "Kami tidak mampu melaksanakan undang-undang ini". Atau undang-undang ini tidak cukup baik untuk dilaksanakan sehingga perlu revisi. Saya kira itu yang paling prinsip, sehingga kita tidak berbelit-belit soal teknis, karena kita bukan membicarakan hal yang teknis *banget*. Saya kira itu yang perlu penegasan dari pemerintah soal undang-undang ini mau diteruskan atau tidak atau mau direvisi, supaya kita datang kepada satu solusi yang memang menjawab kebutuhan rakyat Indonesia.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Ada lagi sebelah kanan saya? Sebelah kiri saya?

Demikian yang sudah disampaikan oleh masyarakat Indonesia melalui perwakilan mereka yang hari ini menjadi penyambung lidah kepada pemerintah dengan pembahasan hari ini menyangkut kenaikan iuran BPJS, kemudian pembayaran utang klaim rumah sakit yang dampaknya penolakan pasien di banyak rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, Pak Menteri, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan di luar yang sudah diberikan kepada kami, kami persilakan untuk jalan keluar. Kalau tidak ada, kami akan tutup rapat ini.

Dan sebelumnya, dari meja Pimpinan ada yang akan menyampaikan. Kami persilakan mulai dari Ibu Nini.

#### **F-KB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

Mohon maaf saya terlambat. Tapi sejak *landing* tadi jam dua seperempat (14.15) saya sudah mengikuti *live streaming* dari teman-teman semua, jadi *Insya Alloh* tidak ada penyampaian dari teman-teman Anggota Komisi IX yang terlewatkan.

#### **Pak Menteri, Dirut BPJS, Dewas BPJS dan juga DJSN,**

Saya ingin bertanya, ketika Pak Menteri mengajukan tiga alternatif itu apakah sebelumnya sudah bertemu seluruh pihak dan membuat analisis bersama? Karena akhirnya yang disampaikan oleh BPJS ini berbeda. Yang disampaikan oleh Dewas tadi disampaikan oleh teman-teman ternyata juga berbeda. Bagaimana mungkin mengajukan usulan kepada Anggota DPR, dan itu disepakati oleh seluruh Anggota DPR Komisi IX, tapi ternyata belum ada analisisnya, belum ada kajian hukumnya. Ini benar-benar saya pikir sudah sangat melanggar aturan yang ada.

Alternatif dari menteri ini Pak, bukan alternatif dari orang lain, alternatif dari menteri yang jadi rujukan. Jangan-jangan nanti ada banyak kebijakan-kebijakan Pak Menteri yang Pak Menteri sampaikan ternyata belum ada analisisnya. Ini bahaya seperti ini Pak.

Jadi saya pikir saya sepakat dengan teman-teman semua, kalau ini tidak ada sesuatu yang baru saya mengusulkan ke Pimpinan “ya sudah kita akhiri saja”, kita akhiri saja sampai benar-benar ada sesuatu yang baru.

Seperti yang pernah saya sampaikan ketika kita awal rapat, kalau ini tetap naik dan ternyata tidak ada solusi apapun, saya mengusulkan sekali lagi untuk tidak usah rapat lagi dengan Menteri Kesehatan, dengan BPJS Kesehatan terkait BPJS sampai benar-benar hasil kesepakatan kita dipenuhi, yakni BPJS Kesehatan untuk Kelas III mandiri tidak naik, dan itu sudah bulat dari seluruh Komisi IX, dan itu adalah sikap dari Komisi IX, titik.

***Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Kami persilakan Pak Ansory untuk membacakan pantun bagi kita sekalian.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Baca pantun ya:

Sungguh indah permata jamrud dilihat  
Tuan dan puan akan terpikat  
Jika kita sudah sepakat untuk rakyat  
Tak patut lah untuk berkhianat

Ada lagi ini:

Berdaun lebat pohon cemara  
Tumbuh merata di jalan menanjak  
Masyarakat makin sengsara  
Marwah DPR RI kau injak-injak

Lagi:

Pergi kondangan memakai batik  
Batik dipakai oleh Pak Haji  
Dulu sepakat iuran Kelas III tidak naik  
Tapi mengapa sekarang kau ingkar janji

Yang terakhir:

Kita punya lagu Indonesia Raya  
Bendera Merah Putih kita junjung tinggi  
Jika kamu ingin dipercaya  
Jangan pernah mengingkari janji

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Dengan demikian kembali saya sampaikan kepada Pak Menteri, apabila ada yang mau disampaikan di luar presentasi yang sudah ada.

**INTERUPSI F-... (.....):**

Pimpinan, waktunya sudah lewat.

**KETUA RAPAT:**

Kami tambah 10 menit ya.

**INTERUPSI F-... (.....):**

Pimpinan, 2 menit saja.

**KETUA RAPAT:**

Kami persilakan Pak Menteri.

**MENTERI KESEHATAN RI (Letjen TNI (Purn) Dr. dr. TERAWAN AGUS PUTRANTO, Sp. Rad. (K) RI):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Salam sejahtera buat kita semua,  
Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.***

**Yang terhormat Ibu Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir pada saat ini yang berbahagia,**

Tidak ada yang lain mau saya sampaikan, kecuali saya juga ikut kecewa dan prihatin. Makanya sebenarnya saya sudah menjawabnya dengan surat pertanyaan dari BPJS mengenai apa dasar hukum dan saya sudah dengan tim hukum saya sudah kemukakan dengan surat yang saya tembuskan ke Komisi IX. Surat itu bahwa jawabannya di situ tadi sudah dikatakan 'dapat'.

Memang ada beberapa hal yang kenapa saya dengan ini kemudian yang kedua saya tidak menyatakan pendapat untuk solusi. Buat saya, percuma saya mengemukakan pendapat yang ternyata di kemudian hari yang sudah disepakati bersama juga tidak bisa dilaksanakan. Menurut saya itu adalah wujud kekecewaan saya juga untuk saya berani mengatakan bahwa saya tidak punya solusi kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan. Dan itu buat saya sedih sekali, sama dengan Saudara-saudara Komisi IX. Karena itu izinkan saya untuk tidak memberikan jalan keluar mengenai itu, karena saya membutuhkan data yang lengkap, saya membutuhkan komitmen. Dan saya beritahukan bahwa itu kewenangan ada di BPJS, tidak ada di mana-mana, dan itu berdasarkan undang-undang saya kemukakan. Saya bingung sendiri kalau itu ternyata dilempar ke kanan-kiri, karena itu kesepakatan kita. Saya lebih baik jantan mengakui bahwa saya tidak bisa memberikan solusi kalau memang permasalahan tidak bisa dilaksanakan dan juga

transparansi tidak bisa dikerjakan. Namun mudah-mudahan akan ada perubahan itikad yang akan membuat saya mendapatkan bahan yang lebih lengkap, sama mungkin ada hal yang lebih. Siapa tahu masih ada peluang untuk dilaksanakan, karena kewenangannya memang ada di BPJS.

Itu saja yang bisa saya kemukakan. Saya mohon maaf atas semua ini, karena semua yang saya dengarkan semua memang itu sama dengan ada yang di hati saya.

**INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Mohon izin, Pimpinan. Mohon izin melalui Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Abidin.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Penjelasan dari Pak Menteri kan *clear*. Pertanyaan saya, terhadap solusi yang menurut Pak Menteri jalan buntu, itu terkonfirmasi tidak dengan presiden? Itu penting. Karena BPJS itu kan berlindungnya di presiden. Jadi kan usulnya kan begitu, walaupun itu di BPJS. Usulan Pak Menteri itu kan agar menyelesaikan di BPJS, begitu Pak Menteri ya? Terhadap usul ini apakah terkonfirmasi dengan presiden? Kalau tidak terkonfirmasi itu mohon disampaikan ke presiden, artinya BPJS berdasarkan undang-undang, kan begitu penjelasannya dari BPJS, bahwa tidak memungkinkan melakukan itu. Betul ya, Pak Dirut? Agar apa? Agar juga presiden, saya sampaikan tadi, ini pendekatannya harus *special treatment*, harus ada terobosan. Kalau tidak ya memang jalan buntu.

Itu mohon jawaban Pak Menteri apakah..., mungkin bisa melalui Pimpinan dijawab, apakah presiden sudah mengetahui jawabannya dari Kementerian Kesehatan bahwa BPJS tidak memungkinkan melakukan berdasarkan undang-undang atas usul dari Pak Menteri Kesehatan? Saya *clear* itu. Kalau Pak Presiden belum tahu harus dikasih tahu.

Begitu, Pimpinan. Silakan, Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Silakan, Pak Menteri.

**MENTERI KESEHATAN RI:**

Kami akan memberitahukannya bahwa saya juga baru resmi mendengar hal ini. Sebenarnya saya hanya mendengar, terus saya tidak berani mengemukakan sebelum saya yakin bahwa tidak dijalankan. Karena waktu itu juga saya sudah mendapatkan WA dan WA saya teruskan untuk jangan melakukan kenaikan. Dan WA itu sudah saya japri langsung ke BPJS bahwa jangan menaikkan, karena itu kesepakatan kita semua waktu rapat dengan DPR, dan itu saya sampaikan. Kemudian beliau menulis surat ke saya dan saya jawab dengan resmi surat itu secara tertulis. Ini adalah aturan main dimana saya mendapatkan surat pertanyaan apakah memang tidak menyalahi hukum. Semua tim hukum saya menjawab

dengan seperti itu, ada kata di poin terakhir kata *dapat* dan itu menunjukkan bahwa diskresinya memang ada di BPJS, bukan di pemerintah.

Karena memang tidak ada rentang kendali, artinya saya tidak punya rentang kendali untuk memaksa. Kalau di militer itu kalau ada rentang kendali enak, atau ada kendali di siapa enak. Tapi kalau tidak ada ya memang repot sekali, saya sebagai Menteri Kesehatan ya bingung. Saya membuat aturan apapun kalau tidak dijalankan juga tidak ada masalah, karena memang itu masalah rentang kendali. Dan anggaran pun memang dilewatkan ke saya, hanya lewat saja. Tetapi pertanggungjawaban akan anggaran itu digunakan seberapa atau berapa juga saya tidak mendapatkan laporan yang baik. Karena itu digunakan untuk apa, kalau defisit ya defisit berapa. Kalau defisit kita tinggal carikan jalan keluarnya, entah dengan cukai dan sebagainya atau dengan apapun. Tetapi selama dihitung bahwa itu dengan kenaikan ini lebih, maka saya berpikir saya berikan alternatif jalan keluarnya. Kalau saya memberikan alternatif dan kami sepakati dan kemudian tidak dijalani dengan dasar hukum yang sudah saya sampaikan, ya saya sama, saya juga kecewa, karena saya yang mengusulkan. Masak saya yang mengusulkan saya mengkhianati diri saya sendiri. Tapi yang jelas saya tidak punya rentang kendali. Apalagi jelas dikemukakan dalam *website* dari BPJS memang itu hubungannya adalah hubungan koordinasi. Seperti saya *ngobrol-ngobrol* apa yang bisa diinikan, apa yang harus saya siapkan. Tetapi tidak ada pemaksaan ataupun sebuah kendali bahwa kamu harus *nurut* ini, kalau tidak *nurut* kamu akan bermasalah. Itu tidak ada. Itu adalah satu hal yang membuat komando dan pengendalian tidak ada. Dan itu saya baca isi semua undang-undangnya ya memang seperti itu. Kalau Bapak mengatakan bahwa harus ada revisi ya kalau memang bisa dilakukan revisi ya menurut saya jauh lebih baik. Karena kalau tidak siapa yang bisa memeriksa BPKP? Kan tim audit *independent* juga yang dikemukakan di undang-undang, bukan BPK seperti yang dikatakan. BPK juga tidak bisa memeriksa audit *independent* atau eksternal.

Saya cinta *banget* sama rakyat, kita harus bersama-sama memang pikirkan ini. Buat saya kalau apapun risikonya ya kita memang harus lakukan. Ada kendali yang tidak bisa dilakukan. Kalau memang tidak ada kendalinya ya bagaimana. Kami izin, kalau ini dinaikkan ke atas ya tidak akan selesai-selesai. Kalau di undang-undang dibaca ini kekuasaannya memang ada di BPJS untuk menentukannya dan itu saya uraikan di jawaban surat saya. Tidak ada naik ke atas.

Melanggar undang-undang, undang-undang yang mana? Karena itu saya kemukakan. Kalaupun dianggap melanggar Perpres, Perpres di ayat mana? Yang penting jumlah yang dibayarkan akhirnya sama. Entah asal bayarnya dari mana itu kan tidak ada persoalan.

Mungkin itu saja saya sampaikan, Pimpinan.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Saleh.

Pak Saleh, sebentar, kita tambah waktunya sampai Jam 17.00 ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Tanggung Jam 17.00, Jam 00.00 saja.

Pertama, saya baru sekali ini ikut rapat dengan kementerian, ini saya masuk periode kedua ini, menterinya mengatakan 'angkat tangan' *lah*, 'pokoknya saya tidak ada solusi'. Baru sekali ini tidak lazim. Karena memang pejabat itu adalah pelayan, melayani masyarakat. Ini ada *problem* di masyarakat terus angkat tangan 'saya tidak bisa melayani', ini kan aneh. Lalu untuk apa ada struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang lengkap seperti itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang betul-betul sangat *urgent* dan sangat penting yang ditunggu oleh masyarakat. Itu dulu. Rasa-rasanya tidak enak ya kita berada bersama dengan Pak Menteri terus tiba-tiba Pak Menterinya bilang tidak sanggup, lalu akhirnya kita ikut tidak sanggup.

Yang kedua, saya juga tidak percaya juga sebetulnya itu kalau BPJS seperti itu angkuhnya. Ini harus kita klarifikasi juga BPJS-nya, *kok* angkuh *banget* mengatakan dia tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain. Selama ini anggarannya dari sini BPJS ini. Kalau misalnya awalnya itu kita anggarkan tahun lalu 25 triliun, tahun berikutnya 26 triliun, betul tidak? Anggarannya kan di sini diketoknya. Setiap lembaga yang dibiayai dan dianggarkan anggarannya oleh DPR, DPR berhak untuk intervensi. Anggaran rakyat. Kalau misalnya tidak boleh intervensi jangan dianggarkan di sini, tutup semua anggarannya, kembalikan BPJS ini menjadi Jamkesda ke daerah-daerah. Kemarin di sini semua kepala-kepala daerah perwakilan mengatakan, "Kami tidak suka dengan BPJS ini secara nasional, cuma karena sudah undang-undang kami ikut". Mereka lebih senang kalau itu kembali ke Jamkesda, biar mereka bayar sendiri. Tinggal kita perbaiki rumah-rumah sakitnya saja. rumah sakit umum daerah kita perbaiki, kita layani mereka dengan benar. Rakyat itu semua, siapapun yang sakit harus berobat gratis. Kata mereka itu paling banyak ada yang 15 sampai 20 miliar 1 tahun. Sekarang dengan adanya BPJS mereka itu bisa dikenai 50 miliar, rugi mereka. Ini yang mana yang salah? Undang-undangnya yang salah? Kita yang salah? Manajemen yang salah? DPR yang salah? Siapa yang salah? Ini tidak boleh ada *statement* kayak begini. Ini saya tidak percaya ada seperti ini bahwa tidak ada lembaga yang bisa intervensi BPJS ini. Ini apa-apaan ini. Mulai dari Pak Fahmi, kemudian ini ada Pak Bayu, ada Pak Dewas di sini semua segala macam, ini tidak bisa diintervensi. Kan uang negara, kewenangan Bapak semua di sana pakai uang negara. Bapak menjadi petugas di situ, menjadi pejabat di situ, itu kan pakai undang-undang yang disahkan oleh DPR. Kalau DPR tidak bisa mengawasi Bapak, tidak bisa mengintervensi, apa hubungan kita berarti? Salah semua logika berpikirnya itu, tidak setuju saya dengan jawaban ini. Ini yang dari tadi saya katakan, ini mohon maaf teman-teman, ini penafsiran seperti ini adalah gagal tafsir, gagal paham dan menurut saya ini tidak kontekstual, tidak boleh diungkap seperti ini. Salah ini.

Yang ketiga, ini mohon maaf, ini tutup rapat, semua tadi *legowo*, "Sudah tutup rapat saja *lah*, malas ini". *Ngapain* kayak begini rapat-rapat terus tidak ada solusi. Apa kita biarkan rakyat kita tidak diurus, kan begitu masalahnya. Ini mohon..., periode yang lalu itu ada satu menteri diusir dari DPR tidak datang-datang lagi. Sampai akhir periode tidak datang-datang. Dinikmati sama mereka tidak datang ke DPR. Ini terjadi. Coba teman-teman lihat itu, dinikmati. Sampai akhir periode tidak datang, menterinya senang. Apa mau ini teman-teman ini kayak begitu? Tidak boleh! Harus ada tanggung jawab. Kan pejabat negara itu bertanggungjawab. Semakin tinggi jabatannya ya semakin tinggi

tanggungjawabnya. Fasilitas menteri juga enak. Mohon maaf ini, di luar tanggung jawab yang besar itu tapi fasilitasnya kan enak.

Kita ini, Kak Ribka, *nengok* uang sedikit saja kan kita cuma main di honor saja, di gaji saja bulanan kita. Itupun sudah disorot habis oleh masyarakat. Tidak apa-apa, kita dengar itu, kita terima itu sorotan masyarakat itu. Ini pemerintah 58 triliun Kementerian Kesehatan setiap tahun kita berikan kepada mereka untuk mengurus rakyat ini tiba-tiba sekarang ada solusi. Mau terima kayak begitu? Tidak bisa. Jangan sampai orang-orang di kampung-kampung kita, di Dapil-dapil kita itu mereka menjerit seakan-akan kita tidak memperjuangkan mereka sekarang. Kita suruh menterinya pulang seakan-akan kita ini lepas tangan dengan mereka. Anggarannya tetap naik, kemudian iurannya tetap naik, di mana kesejahteraan yang kita janjikan kepada mereka? Pakai nurani Saudara-saudara. Ini ideologi, ini idealisme perjuangan. Perjuangan kita ini, hati di sini bicara.

Saya tidak mau kalau misalnya “ya sudahlah kita tutup saja rapat ini”, ya sudah senang semua pada bubar. Terus solusinya apa? Tidak ada? Tidak bisa begitu. Kalau perlu hari ini kita tetapkan/kita putuskan kita ganti undang-undangnya. Besok kita ketemu dengan Ketua Baleg, kita masukkan, disisipi Prolegnas itu. Panggil Menteri Hukum dan HAM, panggil Baleg, bicarakan, masukkan, sisipkan, masukkan tambahan Prolegnas itu. Kita sisir yang tidak perlu, kita masukkan yang ini.

Ini kan hajat hidup orang banyak. Pendidikan dan kesehatan itu adalah dua hal yang harus betul-betul bisa menyentuh seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada satupun warga negara kita yang tidak boleh mendapatkan akses untuk kesehatan, berdosa pemimpinnya. Jangan sampai Presiden Jokowi berdosa karena kita tidak bisa mengurus dengan benar. Pak Menteri angkat tangan tidak boleh, Pak. Saya yakin presiden tidak seperti itu, coba kita dengarkan dulu.

Kemarin Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, mengatakan ini kita janjikan tidak naik ini iuran BPJS sampai datanya benar, sampai datanya jelas. Ada riwayatnya kita rapat di sini. Tapi tahu-tahu datanya belum jelas, kenaikannya tetap jalan, ini kan tidak sinkron apa yang disepakati dengan yang dilakukan.

Tadi sudah dibacakan bahwa hak-hak DPR itu kita boleh mengeluarkan rekomendasi. Setiap rekomendasi yang dikeluarkan DPR harus diikuti. Ini tidak diikuti. Mana yang betul kita ini? Saya ini mohon maaf ini, sekali lagi ini menurut saya ada kesalahan-kesalahan yang nanti berulang lagi. Besok-besok kalau ini kita lepas saja ya sudahlah begini, biarkan saja, keluar saja, pulang”. Besok-besok kalau ada masalah seperti ini lagi begitu lagi caranya. Mana solusinya? Kita ini butuh solusi. Tidak boleh Menteri mengatakan, “Saya mohon maaf tidak punya solusi.” Tidak mau saya kayak begitu. Menterinya harus kasih tahu pada kita. Besok kalau saya ditanya masyarakat apa jawaban saya? Kan tidak ada jawaban saya. Kalau tidak ada jawaban saya malu saya, seakan-akan saya jadi wakil mereka tidak membicarakan perjuangan apa yang mereka sampaikan kepada saya, apa yang mereka inginkan.

Ini ada orang menyebut di *facebook* saya dia mengatakan, “*Waduh*, ini DPR lagi drama ini. Lagi teriak-teriak kencang-kencang, lagi seakan-akan memperjuangkan kita, tapi nanti ujung-ujungnya percaya tidak akan ada apa-apa, pasti akan tetap naik.” “Pak, kami ini lagi susah. Harga kopi tidak naik-naik, harga karet tidak pernah naik, harga sawit kadang naik kadang turun. Kalau lagi banyaknya dia malah turun banget, kalau sedikit buahnya malah naik. Mana kesejahteraan kami yang dipikirkan oleh negara? Sekarang kami disuruh membayar iuran BPJS yang diwajibkan oleh negara untuk ikut jadi peserta.” Mereka menyebut kita sedang berdrama, Saudara-saudara. Apa betul mau kita



disebut berdrama, pura-pura, bohong di sini kita bicara? Saya bicara ini atas nama hati nurani saya. Kan saya sudah undang ini pejabat Kementerian Kesehatan. Saya sering menantang, "Pak Bambang, ayo kita ke kampung saya, biar Bapak tahu bagaimana kehidupan orang sana susah seperti apa." Orang mencari uang 30 ribu sehari susah, sekarang mereka disuruh membayar BPJS berapa ratus ribu satu keluarga untuk 1 bulan? Ini penting tidak? Sangat penting. Kalau merasa ini tidak penting, bubar saja kita ini Komisi IX ini. Separuh daripada tugas Komisi IX itu adalah mengurus kesehatan ini.

Ini saya mohon tolong teman-teman ini. Saya bukan berarti tidak senang pulang, saya senang sekali pulang. Saya pulang ke rumah enak sekali, ketemu anak saya, mereka baru pulang sekolah saya bisa bercengkrama dengan mereka. Tapi di sini kalau masih ada persoalan yang belum selesai dan tuntas, saya tidak menginginkan seperti itu. Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional menuntut kepada pemerintah tanggung jawabnya dimana mengurus rakyat ini. Jangan enaknya saja. Tanggung jawab mengurus rakyat itu harus jelas. Dan kami tidak mau disebut kami berdrama di sini, tidak ada drama di sini.

Mohon maaf, demikian teman-teman, mohon maaf Pak Menteri. Mudah-mudahan ini ada solusi, tolong dipikirkan ini semua. Saya juga minta klarifikasi dari BPJS soal *statement-statement* mereka yang kayak begini ini di *website-website* ini. Ini kan dikutip ini dijadikan rujukan seperti itu, minta penjelasannya. Kalau betul penjelasannya seperti ini, besok-besok itu anggarannya langsung kita periksa. Kita yang periksa. BPK itu kan kita yang menugaskan, sebetulnya kan kita yang berhak untuk memeriksa langsung. Karena kita tidak bisa secara langsung detail untuk memeriksa ya kita serahkan kepada mereka. Siapa bilang kita tidak memeriksa, itu kan uang rakyat.

Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

**INTERUPSI F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Interupsi, Ibu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Yahya.

**F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Saya tidak ingin berpantun walaupun bisa berpantun.

Jadi saya kira kita agak menyesal ini dengan pernyataan Pak Menteri 'tidak bisa memberikan solusi'. Saya akan kutip pernyataan Menko PMK yang memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi sekarang ini, karena 3-4 hari sebelumnya saya WA beliau atas pernyataan saya, "Pak Ansory, saya meminta supaya BPJS memperjuangkan Kelas III mandiri menjadi peserta PBI." Saya SMS ke beliau. 3 atau 4 hari kemudian beliau membuat pernyataan yang mirip dengan pernyataan saya, antara lain beliau menyatakan begini, "Pemerintah saat ini masih

menyisir seluruh data peserta kelas mandiri. Dari hasil tersebut nantinya jika ada peserta mandiri yang tergolong tidak mampu akan dimasukkan sebagai peserta penerima PBI.” Ini pernyataan Menko PMK. Jadi nanti kalau selama ini peserta iuran ada yang mengalami *exclusion error*, maka akan kita tarik menjadi peserta PBI. Jadi sebenarnya Menko PMK sendiri sudah ada solusi yang mirip dengan yang kita bicarakan di Komisi IX ini. Seluruh teman-teman setuju agar peserta Kelas III mandiri dibiayai oleh APBN atau oleh pemerintah masuk menjadi peserta PBI. Masak Menteri Kesehatan tidak berani memberikan solusi, Menkonya sendiri sudah memberikan solusi ini. Jangan-jangan Pak Menteri tidak pernah koordinasi dengan Menkonya di sini.

Jadi saya kira kalau kita ingin memberikan solusi terhadap rapat hari ini, ini barangkali satu solusi yang kita sepakati. Apakah Menteri Kesehatan tidak bersedia tidak ada menjadi masalah, yang penting kita sepakati kesepakatan rapat Komisi IX pada hari ini.

Saya kira begitu, Pak Saleh, ini solusi yang ditawarkan oleh Menkonya sendiri yang kita juga membicarakan di dalam forum rapat Komisi IX tadi pagi. Jadi sekali lagi saya menyesalkan kalau Pak Menteri tidak punya solusi. Menkonya sendiri punya solusi ini tanggal 9 bulan Januari tahun 2020. Dan Menko memberikan instruksi kepada Menteri Sosial untuk menyisir datanya berapa jumlah peserta Kelas III mandiri yang benar-benar tidak mampu dari 20 juta itu, artinya yang tidak mampu menjadi prioritas. Jika keuangan negara mampu, 20 juta harus beralih semuanya kepada peserta PBI.

Saya kira itu mungkin, Ibu Ketua, supaya kita tidak berbusa-busa dari siang tadi sampai sore ini.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Silakan, Pak Abidin.

#### **F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Saya tadi melalui Pimpinan menanyakan langsung kepada Pak Menteri. Pak Menteri tadi menyampaikan akan menyampaikan kepada presiden. Betul ya, Pak Menteri? Karena menurut Pak Menteri tadi belum disampaikan ke Pak Presiden. Jadi harus segera itu. Jadi mohon klarifikasi, betul begitu Pak Menteri ya? Hasil rapat sore ini tadi Pak Menteri menyatakan, saya tanya langsung tadi melalui Pimpinan, apakah hal yang sudah disampaikan BPJS Kesehatan disampaikan oleh Pak Menteri, terkonfirmasi ke presiden atau tidak? Kata Pak Menteri, “Akan saya sampaikan.” Berarti kan belum. Oleh karena itu menurut kami ini masih ada solusi. Pak Menteri harus teguh dalam menyampaikan, BPJS juga harus berbenah juga. Nanti kalau presidennya berubah ini juga BPJS-nya. Sudahlah, jangan berlindung terlalu dalam bahwa seolah-olah BPJS itu tidak tersentuh, apalagi oleh Komisi IX. Tadi Pak Saleh sudah cukup menjelaskan bahwa memang prinsipnya parlemen itu semua bisa kita minta pertanggungjawaban. Siapapun setiap warga negara kalau dipanggil parlemen harus datang. Apalagi ini BPJS diputuskan di Paripurna mitranya Komisi IX, jadi masih bisa kita benahi, masih ada solusi.

Saya kira itu, Pimpinan. Mungkin hari ini tidak, tapi ada itu karena belum ini. Jadi Komisi IX mendesak presiden untuk menyelesaikan soal ini melalui Kementerian Kesehatan.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Ibu Ribka. Setelah ini Ibu Yayuk.

**F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING):**

Saya rasa tadi Pak Saleh *lah*, Pak Yahya, Pak Abidin, itu saja sebenarnya singkat usul konkretnya, supaya juga suasana di luar rakyat juga tenang, teduh, nyaman, dingin. Sebenarnya ini kan keputusan politik, Saudara Menteri Kesehatan. Saya tadi sudah bilang bahwa itu perlu keberanian. Menteri Kesehatan itu kan jabatan politik, jadi memang musti ada keberanian. Meskipun itu juga tidak terpakai semua *lah*, yakin sama saya. Tidak ada orang ingin sakit. Tapi paling tidak ada *statement* politik. Misalnya, sudah sekarang diumumkan.

Saya pernah juga WA Pak Menteri, walaupun itu tidak mungkin, saya ini uji nyali, Kelas III pengumuman untuk rakyat Indonesia ditanggung oleh negara, baik swasta/negeri. Tapi habis itu kumpulkan semua Dirut rumah sakit. Persi kumpulkan, Arsada dikumpulkan. Per *statement* saja dulu, bukan memberikan harapan. Kita juga tidak ingin berharap mereka sakit, tapi ada solusi. Satu itu.

Dua, ada revisi Undang-Undang BPJS. Karena ini kan bukan undang-undang untuk satu periode kita lagi ini ke sini, untuk selamanya. Kita kan ingin ada asuransi tingkat nasional yang diwariskan Ibu Megawati, SJSN dulu. jadi jangka panjang SJSN.

Yang ketiga, apa benar memang keangkuhan Pak Fahmi Idris dengan krunya? Atau keangkuhan undang-undangnya? Atau benar atau tidak? Karena ini sebetulnya riwayat dari zaman Askes ini. Kalau sudah Askes sama Kemenkes zaman saya dulu berantem terus, dari Ibu Ori sama Siti Fadhillah. Saya ingat *banget* di sini ini persoalan endap mengendap 1 hari saja berapa bunga. Ingat tidak, Pak? Ini ada Pak Kemal segala. Kan zaman dulu sudah itu, apalagi sekarang BPJS uangnya triliunan. Tadi Pak Menkes bilang, "Saya boleh *ngeluarin*, tapi tidak boleh lihat laporannya". Itu kalau triliunan diendapkan sehari sudah berapa itu bunganya, kan begitu. Itu dari zaman dulu BPJS belum jadi badan itu Askes itu sudah ada begitunya, saling tuduh menuduh. Seperti Binapenta sama BNP2TKI, sudahlah kayak begitu.

Jadi kita juga mengusulkan ada revisi. Kalau memang betul isinya itu. Tapi aku tidak yakin ada Undang-Undang BPJS ada seperti itu 'tidak boleh diintervensi dengan lembaga lain'. Atau memang keangkuhan teman-teman BPJS seperti itu atau apa? Ini kan mumpung ada Pak Fahmi Idris ini, suruh *ngomong* sebentar memang benar ini Pak Fahmi Idris *ngomong* seperti itu. Kita klarifikasi saja di sini, jadi supaya enak juga. Tapi juga keputusan politik *lah*, Saudara Menteri Kesehatan. Tidak usah takut untuk rakyat, tidak ada yang menakutkan. Orang tidak korupsi ini, *ngapain* takut.

Tadi yang Saudara Saleh bilang ada yang didengar rakyat solusi yang 'ya sudahlah Kelas III dulu', begitu. Karena itu tadi saya bilang sama Pak Hasbullah Tabrani, "Bang, kalau sekarang ini lagi situasi seperti ini berani tidak sebenarnya keuangan kita begini, Kelas III dibayar oleh negara?" "Jangankan Kelas III, Kelas II kita bayar sampai Kelas II bisa." Jadi saya punya optimis.

Kita punya niat yang baik semuanya. Kan kita semua ini punya konstituen DPR-nya. Kalau pemerintah tidak diuber-uber PAC ranting, kita ini yang diuber PAC ranting. Rantingnya bisa bawa orang di depan rumah kita, bawa orang

dipakaikan tandu *lah*, kayak begitu. Makanya memang betul harus tunggu. Karena kalau nanti menterinya kayak si Rini, tidak boleh ke DPR, benar-benar sampai satu periode. Orang *ndablek* itu, baru tahu saya orang Jawa *ndablek* kayak begitu. Saya mukanya sangar tapi hati saya *hello kitty loh*, makanya saya sensitif dengan persoalan penderitaan rakyat. Tapi ada orang yang lembut-lembut hatinya batu benar, lihat penderitaan rakyat cuek saja. Kalau saya kan mukanya *doang* sangar, hati saya tapi lembut sebetulnya. Orang tidak tahu saja.

Jadi begitu, supaya ada tiga hal ini, baru kita usulkan revisi undang-undang itu kalau memang ada kalimat-kalimat yang kayak begitu 'tidak boleh diintervensi'. Memang betul ini undang-undang, uangnya saja dari DPR, ada persetujuan DPR, masak DPR saja tidak bisa mengontrol, kan lucu. Kita kan pernah buat Panja. Panja BPJS rekomendasinya supaya diaudit oleh BPK. Dilaksanakan Pak Fahmi Idris pernah. Bisa *kok* disentuh, bisa *kok* menjalankan rekomendasi dari Panja itu. Jadi bagaimana, jadi persoalannya apa kayak begitu?

Jadi ini, Pimpinan, jadi tiga itu nanti saja, ini sebagai catatan hari ini.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, kita perpanjang waktunya lagi, Jam 17.30 ya.

#### **(RAPAT: SETUJU)**

Sebelum Pak Fadholi, kami persilakan untuk Pak Imam Suroso.

#### **F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Terima kasih Ibu Ketua.

Jadi begini, jujur saja masalah ini tidak akan selesai. Saya sudah tahu kunci solusinya, dengar ini, penting ini. Tadi Pak Menteri Kesehatan sudah angkat tangan untuk rakyat. Ini semua adalah kekakuan dari BPJS Kesehatan, Direksinya Dr. Fahmi, tidak transparan *lah*, tidak terbuka dan lain-lain. Ibu Ketua, saya minta nanti kasih kesempatan Pak Dr. Fahmi menjawab yang disampaikan Menteri Kesehatan yang sudah lemas, sudah tidak sanggup.

Yang ketiga, terakhir ini solusi yang penting, menurut saya Pak Menkes, Dr. Fahmi, lobi Menteri Keuangan. Kuncinya hanya bendahara negara ini yang bisa. Selesai itu menghadapi Pak Jokowi, selesai itu barang. Komisi IX mendukungnya, *clear* untuk rakyat.

Itu saja, Ketua.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Sebelum diberikan kesempatan kepada Pak Fahmi, kami persilakan Pak Fadholi.

#### **F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Izin, Pimpinan.

Pak Rahmat, setelah Pak Fadholi Pak Rahmad.

**KETUA RAPAT:**

Setelah Pak Fadholi Pak Rahmad, Pak Anwar, kemudian Ibu Netty. Kami persilakan Pak Fadholi.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,  
Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Setelah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan juga apa yang sudah disampaikan oleh para senior-senior terdahulu, baik Pak Saleh maupun Ibu Ning, yang sangat menawan sekali ini. Ibu Ning ini tidak sangar, menurut saya itu sangat cantik sekali itu. Saya perlu ada satu penegasan ketika ada satu ketidaksesuaian antara rapat yang sudah disepakati antara kementerian dengan DPR, bahwa di Kelas III itu kan jelas tidak naik waktu itu. Otoritas yang memerintahkan ini siapa? Ini harus dibuka sekarang di sini, ini harus buka-bukaan, ini harus transparan.

Kemudian yang kedua, apakah setelah kita lakukan rapat dan kemudian dari kementerian sudah sepakat bahwa ini tidak akan naik, sudahkah konsultasi kepada jajaran terkait? Termasuk juga paling tinggi ke presiden. Saya khawatir kalau ini memang belum ada satu konsultasi dan kemudian belum ada restu dari presiden tetapi ini tetap naik, ini kan sangat berbahaya. Ini menyangkut hajat masyarakat lebih besar. Dan urusan kesehatan itu tidak bisa main-main. Dan faktanya bahwa sampai saat sekarang ini banyak sekali rumah sakit yang mengeluh dan juga banyak sekali keberatan yang disampaikan oleh masyarakat. Ketika kemudian keberatan-keberatan ini mengkristal menjadi satu, kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau kemudian nanti ada unjuk rasa yang lebih besar. Oleh karena itu apakah benar bahwa ini sudah sepengetahuan presiden bahwa ini naik atau tidak naik? Saya minta harus dibuka secara transparan. Apakah ini memang kehendak dari BPJS? Apakah memang ini ada kehendak-kehendak yang lain? Sekarang kita buka saja.

Kalau memang dari hasil-hasil rapat kepada kita dan kemudian ada kesepakatan dan tidak dilaksanakan lagi, itu artinya ada satu pengingkaran. Kenapa kita kalah dengan lagunya Broery, Broery itu ada lagu 'Jangan Ada Dusta Diantara Kita'. Kalau kita bawa kemesraan yang bagus, maka jangan pernah ada pengingkaran terhadap anggota kita. Kalau itu yang dilakukan sangat-sangat menyakitkan sekali. Maka benar apa yang saya katakan komandan, Bapak kita ini, Pak Saleh Daulay, ini luar biasa.

Oleh karena itu, Bapak/Ibu sekalian, jadi Pak Menteri, saya sepakat ini harus dicari solusi. Tidak bisa kita mengatakan tidak ada solusi. Masak kalah dengan Pegadaian 'Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah'. Tingkat Menteri Kesehatan *kok* kalah dengan Pegadaian, kan kacau. Kita *support* bersama-sama, jangan ragu, dan ini kita berpihak untuk bisa kepentingan. Saya paham dengan aura wacana kebathinan Pak Menteri itu saya paham sekali sebetulnya kan begitu. Tetapi memang ini satu pilihan yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan baik.

Jadi ini belum kita sampai pada tataran BPJS. Sebetulnya kan ini, kita ini kadang-kadang berpikir ini kadang-kadang kita merenung kenapa urusan kesehatan untuk masyarakat yang lebih luas, begitu banyak, kita serahkan kepada

asuransi begitu saja. Tidak bisa ini. Padahal publik dan masyarakat harus tahu bahwa pemerintah ini hadir dan telah memberikan subsidi, artinya juga memberikan biaya untuk pengobatan secara gratis. Ini juga harus disampaikan ke masyarakat. Maka ini harus dikaji dengan baik dan harus dicari solusi dengan baik. Bilamana perlu saya pikir sekalipun dulu mungkin pernah ada Panja atau apapun katanya terkait dengan BPJS, karena melihat persoalan yang sangat krusial ini dan ini harus diselesaikan dengan baik, saya adakan usulan agar ini mungkin perlu dibentuk Panja, sehingga satu Panja yang akan kita bentuk ini kita fokus pada saat ini. Karena kita juga terkaget dengan beberapa persoalan yang ada ini. Ini adalah urusan masyarakat secara luas. Kesehatan tidak bisa ditunda begitu saja, tidak main-main.

Saya pikir itu. Maka harapan kami, harapan saya di sini dalam kesepakatan rapat yang pertama harus ada solusi, terus harus ada kesimpulan dan jangan pernah lagi ada kalah dengan lagunya Broery 'Jangan Ada Dusta Diantara Kita'.

Terima kasih, Ibu ketua dan Anggota.

***Akhirul Kalam.***

***Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Kami persilakan Pak Anwar. Setelah Pak Anwar Ibu Netty.

**INTERUPSI F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Saya atau Pak Anwar?

**KETUA RAPAT:**

Pak Rahmad dulu. Silakan, Pak Rahmad.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Baik, terima kasih.

**Salam sejahtera, selamat sore.**

**Merdeka!**

**Ibu/Bapak sekalian, Pak Menteri dan Rekan-rekan sekalian,**

Saya tidak masuk substansi. Cuma saya mencoba menyoal etika saja. Saya sebagai organisasi yang mendapatkan amanah dari masyarakat di DPR, tugas DPR itu tiga Pak: anggaran, legislasi dan pengawasan. Khusus manajemen BPJS saya *kok* geli ya, mau marah tapi sayang energi, ini ada kata-kata yang di lembaga resmi, dalam hal ini Bapak di *website* Bapak "tidak bisa diintervensi". Parlemen itu mengintervensi dalam fungsi anggaran Pak. Anggaran Bapak yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak dalam ruh rakyat, tidak rel rakyat, tugas parlemen ini mengawasi, mengontrol, bahkan membintangi, mencoret, mengurangi, kalau perlu

mengusulkan menambah kalau itu ruhnya dirasa kurang. Lembaga kami itu dalam rangka untuk mengintervensi kepada lembaga mitra kerja yang tidak berpihak kepada rakyat. Seolah-olah ini nadanya Bapak tidak membutuhkan kami, tidak membutuhkan mitra kerja atau juga tidak membutuhkan koordinasi.

Bijaklah barangkali, ini suasana batin masyarakat dalam hal ini adalah masih mengharapkan untuk kenaikan itu ditunda. Jangan serta merta ego kita bahwa 'pokoknya tidak ya tidak', sehingga ada asumsi teman-teman melakukan nabuk menggunakan tangan orang lain. Artinya apa? Kita lihat, saya baru beberapa membaca di media bahwa itu adalah melanggar undang-undang. Saya juga dapat WA dari teman-teman, juga ada disuara-suarkan dari teman-teman sendiri. Jadi ayolah kita sejuk, kita berpikir keras. Jangan *piyai*-nya lembut tapi hatinya batu.

Pak Dirut, saya mendengar informasi di saat rakyat bersedih hati mengharuskan membayar BPJS Kelas I, II, III, kinerja BPJS setiap rapat laporan dari salah satu direksi rumah sakit yang bekerjasama dengan Bapak diundanglah setiap kegiatan kerja itu tinggal di hotel berbintang 2 hari, 3 hari, pulang digaji satu juta sekian. Itu kan harus pertanggungjawaban Bapak.

Kalau substansi saya ikut teman-teman yang lain *lah*, pasti ada solusi. Karena dari Pak Menteri tadi sudah menyampaikan bola di tangan BPJS Kesehatan. Politik kebijakan sudah kita ambil semuanya di sini beberapa waktu lalu, tapi tolonglah kita *wise*. Kalau ternyata Bapak ada satu kendala psikologis kelembagaan atau dengan *personal* jangan diangkat di dalam suatu ego kemudian menimbulkan kontra seperti ini. Ini kalau sebagai parlemen tersinggung Pak. Kalau kami tidak menyetujui, tadi membintangi kita kurangi 10 miliar-20 miliar, dikurangi sekian miliar, Bapak tidak bisa apa-apa. Bapak membutuhkan kami dalam rangka untuk rakyat. Fungsi kami anggaran mengawasi Pak. Belum lagi ada beberapa kegiatan yang hanya sebatas membuang/menghabiskan anggaran, tapi Bapak tidak tahu bagaimana penderitaan teman-teman masyarakat itu semua.

Jadi memang sudah sepantasnya teman-teman sekalian saya mendukung memang harus klarifikasi ini. Saya sadar Bapak sangat baik hati. Tapi kalau seperti ini Bapak nampaknya organisasi Bapak keras kepala, kelembagaan Bapak keras kepala. Saya tidak menyebut orang *personal*. Kalau sebagai direktur atau sebagai Dirut bahwa ini harus yang bertanggungjawab ini, pelecehan ini Pak. Apakah ini ditujukan kepada parlemen, apakah itu ditujukan kepada lembaga mitra di pemerintah. Masak internal pemerintah sampai mengeluhkan seperti ini, kan memalukan. Itu, Pimpinan. Kalau masalah substansi saya ikut yang lain, pasti ada solusi. Karena ini bola di tangan Pak Dirut.

Dan yang kedua sekali lagi kita kedepankan saling menghormati diantara kita semua, dalam hal ini untuk soal etika.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Merdeka!***

**KETUA RAPAT:**

Kami persilakan Pak Anwar. Setelah Pak Anwar Ibu Netty dan kami berikan kesempatan untuk Direktur BPJS.

**F-PD (ANWAR HAFID):**

Terima kasih.

## **Pak Menteri dan Pak Dirut,**

Saya ingin memberi sedikit jalan keluar soal persoalan ini. Pertama saya ingin menyatakan pada kesempatan ini bahwa sampai berhari-hari pun kalau bisa ini tetap kita lakukan rapat ini sampai ada solusi, meminta kepada Pimpinan untuk tidak kita berhenti sampai ada solusi, apakah kita skors sampai berhari-hari. Itu saran saya yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan kira-kira Pak Menteri dan Pak Dirut ada solusi misalnya. Sekarang ini kan para pemerintah daerah pada keberatan dengan kenaikan ini, karena mereka juga tersedot APBD mereka. Apakah bisa dikembalikan daerah itu menggunakan Jamkesdanya kembali? Kalau mereka bisa menggunakan Jamkesda saya kira ini tidak akan membebani APBD. Dan saya kira orang yang belum masuk dalam jaminan ini pasti akan ter-cover kalau dikembalikan ke Jamkesda.

Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri bahwa saya mengulangi apa yang disampaikan tadi, Pak Menteri mengatakan bahwa belum bisa berbuat karena belum ada transparansi keuangan dari BPJS. Audit BPKP dengan tujuan tertentu yang pernah dilakukan itu apakah itu tidak cukup untuk memberikan gambaran, memberikan landasan hukum Pak Menteri untuk bisa mengambil kebijakan? Kalau misalnya ada transparansi dari BPJS berarti Pak Menteri bisa mengambil keputusan itu kalau seperti itu bahasa alasan yang saya dengar/ yang saya baca tadi.

Yang keempat, ada juga solusi Pak. Yang memberatkan orang miskin ini kan salah satunya adalah dengan cara pendaftaran kolektif itu. Apa bisa Pak Menteri dan Dirut BPJS mengumumkan bahwa khusus peserta BPJS Mandiri itu hanya bisa mereka membayar yang sakit saja, sehingga itu mereka tidak akan terlalu berat seperti hari ini. Mungkin ini salah satu yang perlu dikaji Pak. Karena yang paling memberatkan itu kalau 1 orang mungkin yang sakit kemudian dia membayar itu tidak berat. Tapi kalau 5-7 orang atau 10 orang dalam rumah tangga, itu yang sangat sungguh memberatkan mereka.

Kemudian selanjutnya pertanyaan saya, apakah Keputusan Presiden ini harga mati, sehingga ada ketakutan yang sangat besar dari Dirut BPJS kalau melakukan ini akan melanggar aturan dan akan berimplikasi hukum? Ini pertanyaan saya, ini Keppres ini harga mati maksudnya? Apakah Bapak Presiden tahu tidak ini bahwa di masyarakat hari ini begitu banyak masyarakat yang susah? Dan saya tahu Bapak Presiden orang yang paling peduli dengan orang kecil, tapi *kok* ini terkesan Pak Presiden sepertinya tidak peduli dengan masyarakat. Dengan Keppres ini seakan-akan semua orang ketakutan. Pak Menteri ketakutan, Dirut BPJS ketakutan, untuk tidak melaksanakan Keppres ini.

Dan yang terakhir, saya mungkin mengusulkan bukan Panja Pak, tapi Pansus kalau untuk membantu Menteri Kesehatan agar keuangan BPJS ini benar-benar dilakukan penelusuran, transparansi, sehingga terbuka bagi masyarakat bahwa memang kenaikan ini sangat perlu dilakukan. Karena BPJS sangat membutuhkan.

Jadi saya berharap kira-kira ini rapat kita skors, kemudian minta kepada Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, kemudian kita lanjutkan rapat. Sampai satu minggu, satu bulan pun kita ada di sini sampai ada keputusan. Ini tidak ada mundur ini, DPR RI Komisi IX tidak akan pernah mundur memperjuangkan ini sampai apa yang menjadi kehendak masyarakat ini bisa terwujud yaitu Kelas III mandiri khususnya itu tidak mengalami kenaikan. Ataupun kalau terpaksa naik, maka pemerintah harus mensubsidi ini sampai keadaan



ekonomi kita menjadi pulih, sampai orang-orang miskin itu menjadi kaya. Saya kira pemerintah banyak solusi, 3,9 triliun sedikit sekali itu dibanding dengan anggaran infrastruktur dan sebagainya. Saya kira Pak Menteri bisa mengambil kebijakan dengan mengurangi anggaran kesehatan pun bisa sebetulnya. Ini tinggal penguatan yang kita lakukan.

Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ada ketakutan yang luar biasa. Apalagi dengan pendapat-pendapat hukum bahwa Dirut BPJS akan mengalami implikasi hukum kalau tidak melaksanakan. Saya kira Pak Dirut tidak usah takut. Saya ini banyak sekali dulu waktu saya bupati mengambil kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang, tapi demi rakyat. Saya contohkan, Pak Menteri, saya pernah mengaspal jalan negara mengeluarkan dari APBD. Kabupaten mengaspal jalan negara. Kemudian BPKP/BPK turun, Kementerian PU turun. Saya bilang, "Silakan anda proses, saya siap dipenjara. Tapi ini demi rakyat. Tapi kalau anda tidak laksanakan kewajiban anda, saya yang berhadapan dengan rakyat." Saya yang tahu penderitaan rakyat. Rakyat saya tidak punya lampu, tidak bisa 24 jam. Saya tanya PLN, PLN bilang ini masih 2 tahun baru bisa anggaran PLN. Saya keluarkan uang dari APBD untuk membangun jaringan listrik. BPK turun mengaudit. Saya bilang, "Silakan audit". Demi rakyat Pak. Dan ini Pak Presiden sudah memberikan sinyal. Saya masih bupati Pak Presiden menyampaikan itu: "Jangan takut berbuat demi rakyat". Yang penting uangnya untuk rakyat. Kalau uangnya disalahgunakan oleh kepentingan kita, itu yang salah.

Ini 3,9 triliun, Pak Menteri saya sarankan ambil keberanian yang besar. Pangkas anggaran-anggaran yang mungkin masih bisa ditunda di kementerian. Sampaikan kepada Bapak Presiden, sampaikan kepada Menteri Keuangan. Saya rela anggaran saya dipotong demi untuk menutupi ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa secara hukum dengan kenaikan ini kemudian ada tindakan diskresi yang dilakukan oleh Pak Menteri, saya kira ini pendapat hukum seperti itu. Tapi kita perlu tahu bahwa kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa.

Saya kira itu saran saya, Pak Menteri.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Kami persilakan Ibu Netty, setelah itu kami beri kesempatan kepada Direktur BPJS.

#### **F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Izin melalui Pimpinan.

Saya sebetulnya sangat terusik dengan kutipan yang diajukan oleh Pak Menkes, halaman 3: 'BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional berhubungan dengan badan hukum publik lainnya, kementerian/lembaga, hubungan kerja tersebut bersifat kemitraan, koordinatif, konsultatif, sinergitas' dan seterusnya sampai kemudian 'oleh karenanya tidak ada kementerian atau lembaga yang dapat mengendalikan' sampai titik, 'kecuali ada penugasan khusus dari presiden'. Ini sumbernya *website* BPJS Kesehatan. Pak Menteri, tolong tunjukkan ini di mana ini, *website* yang mana ini. Kenapa? Karena ketika ini dikutip oleh Pak Menteri ini sungguh menunjukkan kelemahan Pak Menteri di hadapan BPJS. Bapak sebagai regulator, kemudian BPJS sebagai operator, tapi ternyata tidak ada koordinasi dan ini kemudian menggambarkan betapa patologisnya koordinasi antara kementerian dan lembaga. Di mana peran

DJSN? Di mana peran Dewas? *Kok* kemudian sekelas menteri saja tidak bisa berhubungan, tidak bisa langsung mengendalikan BPJS seperti itu. Saya minta tolong ditunjukkan di mana ini *website*-nya.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kesempatan ini kami berikan kepada Direktur BPJS untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Saleh Daulay.

**INTERUPSI F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Ibu, saya tanya ke Menkes.

**KETUA RAPAT:**

Setelah ini baru kita bisa kasih ke Pak Kementerian Kesehatan, karena tadi sudah dijadwal untuk Pak Fahmi.

Silakan, Pak Fahmi.

**INTERUPSI F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Pimpinan, ini kan cuma buka *website*, saya cuma ingin ditunjukkan di mana itu, *website* yang mana.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Pak Menteri, silakan. Bisa dibantu untuk dikasih *connect* ke layar kita.

**BPJS:**

Izin, Ibu Pimpinan. BPJS, Ibu, di depan.

Sementara menunggu, saya mau izin Sholat Ashar. Atau saya jawab dulu baru saya Sholat Ashar sebentar? Karena sudah Jam 17.30.

**KETUA RAPAT:**

Sholat Ashar saja dulu, silakan.

**BPJS:**

Terima kasih, Ibu.

**KETUA RAPAT:**

Hallo, berapa lama ini bisa di-*connect* ke layar kita? Kami mohon dibantu.

**INTERUPSI F-... (.....):**

Pimpinan, tolong ada skors untuk sholat biar mitra kerja kita lebih nyaman sholatnya.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita skors 10 menit dari sekarang.  
Sekarang ini Jam 17.30, Jam 17.40 kami lanjutkan.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 17.30 WIB)**

**KETUA RAPAT:**

Untuk yang membantu dari komisi menayangkan apa yang disampaikan oleh Ibu Netty tadi sudah siap?

*Website*-nya sudah, kami minta penjelasan dari Pak Menteri. Tadi ditanya oleh Ibu Netty untuk Pak Menteri.

Ibu Netty, untuk Pak Menteri ya? Silakan.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Iya, saya minta tadi Pak Menkes untuk menunjukkan mana *website*-nya. Karena tadi saya buka langsung tidak ada itu. Sudah dihapus?

**MENTERI KESEHATAN RI:**

Kami mengambil dari *booklet* yang dikeluarkan oleh BPJS dan bukunya ya seperti itu yang kami unggapkan dari buku yang ada.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Dari *booklet*?

**MENTERI KESEHATAN RI:**

*Booklet*-nya.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Sekarang sudah tidak ada.  
Pertanyaan saya, izin lewat Pimpinan.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Interupsi dulu, Ibu Netty, mohon maaf. Interupsi *of clarification*.

Jadi di sini ini disebutkan sumber *website* BPJS Kesehatan, bukan *booklet*. Ini kan sumber, sumber titik dua *website* BPJS Kesehatan, *Kok booklet?* Maksud saya ini harus *clear* juga yang begini-begini. Ini penting sekali, karena hak-hak DPR ada diamputasi di sini. Tidak boleh begitu.

Demikian, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, lanjut Ibu Netty.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Izin lewat Pimpinan.

Berarti saya sekarang beralih ke Dirut BPJS, apa betul yang tertulis di sini?

**KETUA RAPAT:**

Silakan menjawab, Pak Dirut.

**DIRUT BPJS KESEHATAN:**

Kami sekaligus dengan yang tadi secara keseluruhan atau...?

**KETUA RAPAT:**

Yang ini dulu.

**DIRUT BPJS KESEHATAN:**

Sangat terkait mungkin soal tidak transparan, soal tidak bisa diintervensi.

Jadi *booklet* ini sepanjang yang saya ingat memang diterbitkan oleh kami di awal-awal BPJS Kesehatan berdiri, karena banyak masyarakat bertanya tentang apa itu BPJS Kesehatan, struktur organisasinya, kedudukan hukum.

Sebetulnya tertulis ini adalah pendapat/pengantar pakar. Jadi dalam menulis buku ini memang bertanya dengan berbagai pihak. Jadi Prof. Jimly Asshiddiqie menulis ini sebagai pengantar beliau sebagai pendapat pribadi sebagai pakar.

Kami ingin menyampaikan begini, mungkin karena terkait soal apakah lembaga ini tidak ada yang kontrol. Lembaga ini dikontrol 7 lembaga di luar DPR. Pertama, BPK. Setiap tahun BPK melakukan audit rutin. Selain rutin juga ada tujuan tertentu. Kemudian BPKP mengaudit berdasarkan penugasan. Sepanjang kami menjadi direksi kami sudah dua kali diaudit berdasarkan penugasan khusus. Pertamakali penugasan khusus oleh Menteri Kesehatan pada zaman Prof. Mila. Kemudian yang kedua audit dengan tujuan tertentu penugasan khusus dari Menteri Keuangan. Diluar BPK, BPKP, kami setiap tahun OJK masuk dan melakukan audit. Kemudian di luar itu, tidak reguler, KPK selalu masuk dalam bentuk melakukan riset terhadap apa yang dilakukan BPJS. Dan undang-undang juga memerintahkan secara khusus kantor akuntan publik untuk melakukan audit. Tentu juga itu Dewan Pengawas selalu melakukan monitoring terhadap yang kami kerjakan. Kemudian DJSN. Tidak kurang-kurangnya DJSN mengundang kami menyampaikan hasil pengawasan. Jadi kalau dikatakan lembaga ini lembaga yang sakti, tidak ada yang bisa menyentuh, dengan fakta-fakta itu menurut kami tidak benar adanya. Apalagi kalau bicara struktur Dewas, struktur DJSN, itu sebetulnya perwakilan-perwakilan kementerian/lembaga yang ada di situ. Jadi instrumen pengawasan terhadap BPJS ini sangat-sangat ketat. Itu yang sekaligus kami jelaskan kalau hubungannya dengan *website* ini.

Kalau katakanlah *booklet* ini mengganggu, kami bisa tarik *booklet*. Karena ini kan pendapat dari seorang pakar hukum tata negara yang memberikan pengantar

terhadap bentuk hukum, dasar-dasar hukum, kedudukan BPJS berdasarkan bacaan beliau atas Undang-Undang BPJS. Itu yang pertama.

Kemudian soal tidak transparan keuangan. Kami setiap bulan melaporkan laporan pelaksanaan program keempat lembaga: OJK, Menteri Keuangan, DJSN dan Menteri Kesehatan. Nanti silakan dilihat tanda terimanya laporan itu. Termasuk di dalamnya laporan tentang keuangan. Juga itu tentu laporan secara rutin kepada Dewan Pengawas. Jadi tidak tepat kalau kemudian dikatakan bahwa BPJS tidak transparan. Kami *comply* terhadap semua regulasi, karena perintah untuk melaporkan kepada empat lembaga itu adalah perintah dari regulasi.

Kemudian tentu hal-hal yang teknis kami mohon maaf karena dari tadi kami melihat suasananya bahwa rapat ini tidak ingin masuk ke hal yang teknis, tapi kami ingin menyampaikan saja soal kebijakan yang bisa diambil. Kalau boleh, Ibu Pimpinan.

Kami dengan Kementerian Kesehatan selalu berkoordinasi. Kami satu kesatuan pemerintah. Tidak ada yang katakanlah yang kemudian pada posisi memutuskan sendiri-sendiri. Dalam konteks ini apa yang kemudian menjadi langkah-langkah yang kemudian, mohon maaf Pak Ansory kalau kami dikatakan mengkhianati, ingkar janji atau menginjak-injak marwah DPR, tidak ada niat sama sekali dari kami untuk melakukan itu.

#### **INTERUPSI F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Karena Bapak menyebut nama saya, berarti kalau Bapak tidak ada niat dan tidak melakukan itu Bapak tidak akan menaikkan itu. Ini mutar-mutar, Ibu Ketua, distop saja.

#### **DIRUT BPJS KESEHATAN:**

Saya akan jelaskan dulu prosesnya. Karena tidak mungkin kita rapat kalau bisa menjelaskan, jadi kami menjelaskan.

Setelah itu kan rapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan.

#### **INTERUPSI F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Itu kita *ngomongnya* yang selama ini itu masih gigi dua Pak. Masih gigi dua itu yang di Paripurna maupun yang di sini.

#### **DIRUT BPJS KESEHATAN:**

Kami ingin memberikan solusi.

#### **INTERUPSI F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Bapak bilang tadi apa? Saya pertanggungjawabkan kata per kata apa yang saya omongkan dan saya berani mau apapun akibatnya. Mau apapun akibatnya saya berani.

#### **DIRUT BPJS KESEHATAN:**

Saya tarik kalimat saya, Pak.

### **INTERUPSI F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Bapak sebut-sebut nama saya, saya akan pertanggungjawabkan itu. Ini kita lembaga-lembaga dua ini, Bapak satu lembaga, kami satu lembaga, ya kita sudah. Kalau kita tidak memutuskan disini, saya tidak sebut Bapak berbohong, kalau kita tidak putuskan, saya tidak sebut Bapak mengkhianati. Kalau kita tidak ada kesepakatan, saya tidak sebut Bapak Dzholim.

Dan perlu di ini juga dari Dewan Hukum itu, itu dibuat-buat Pak 'melanggar hukum'. Kita sudah pelajari. Saya juga pernah pimpinan badan di DPR ini. Kalau antar satu badan atau antar kita saja, boleh itu mau kita apakan anggarannya dari yang satu ke yang lain. Bapak kan gotong royong, kalau gotong royong kan bisa Bapak ambil dari yang lain ke yang lain. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan.

Saya mohon apa yang disebutkan Ibu Ribka tadi ditutup saja. Kita *cooling down* dulu, kita juga ini yang sudah pada marah tadi semua. Nanti kita bisa rapatkan juga nanti apa yang mau kita lakukan, nanti setelah itu bisa kita rapat lagi. Saya usul saja, Pimpinan.

### **KETUA RAPAT:**

Pak Fahmi, setelah mendengar masukan dari kami semuanya, ini memang ketidakpuasan dari Anggota DPR Komisi IX menyangkut persoalan masyarakat yang sudah terlalu banyak. Untuk itu rapat kita akan tutup sambil kami akan rapat untuk internal komisi besok untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kami tetap mengawal untuk keputusan apa yang menjadi keputusan pemerintah nanti. Kami berikan kesempatan kepada Kementerian Kesehatan, kemudian Ketua Dewan Jaminan Sosial, Ketua Badan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk berembuk dan biar mendapatkan satu solusi yang betul-betul tidak lagi di langgar, ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Dan kami tidak memberikan waktu banyak, paling lama satu-dua hari kedepan. Tentunya kami akan mempersiapkan Komisi IX dengan Kesekretariatan untuk menyiapkan surat-surat apa yang kami akan sampaikan. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak-bapak untuk beberapa hari ke depan ini. Dan kami akan mengadakan rapat internal besok.

Kami persilakan Pak Abidin.

### **F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Sebelum ditutup ya.

Ini kan sudah berlangsung rapatnya, tetap harus ada keputusan rapatnya, solusinya apa. Jadi tidak mentah. Tetap saja masukan kesimpulan tadi, tetap saja dimasukan kesimpulannya bahwa rapat ini memutuskan agar apa, begitu kan. Karena kan tadi kan ada beberapa hal yang disampaikan Pak Menteri akan mengkonfirmasi ke Presiden. Jadi kan jangan mentah. Ini sudah matang ini, Ibu Felly, tinggal disimpulkan saja. Tadi kesimpulannya apa, itu bagian dari kesimpulan rapat kita.

Soal yang disampaikan berkaitan dengan bahan yang disampaikan Pak Menteri dengan BPJS itu merupakan satu kesatuan dari bahan rapat kita sore ini. Kesimpulannya adalah tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan satu-dua hari lagi akan rapat lagi, itu bagian juga dari kesimpulan rapat kita. Atau tadi Kementerian

Kesehatan juga tadi kan akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada Presiden, misalkan begitu. Kan itu juga bisa dimasukkan dalam kesimpulan rapat.

Saya kira itu, Pimpinan.

**INTERUPSI F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Ibu Intan.

**F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M.):**

Terima kasih.

Ini kita rapat dan dimulai dengan Rapat Internal. Sebetulnya ini koreksi kami juga kepada Pemerintah yang mempertontonkan ketidakharmonisan. Artinya kalau tadi bicaranya seperti itu, kemudian dari paparan Kemenkes memperlihatkan sumber *website*, ini sebenarnya konyol menurut saya.

Saya sepakat dengan Pak Abidin tidak perlu ikut kekonyolan itu. Justru rapat pada hari ini menurut saya sangat penting, kita harus mempunyai kesimpulan yang memang inti permasalahan agenda dari rapat hari ini adalah bagaimana solusi mengenai iuran JKN, iuran BPJS Kesehatan, bagi rakyat kita. Itu dulu, kita kembali kesitu.

Permasalahan mereka, tadi masalah *website*, masalah ini dan sebagainya itu mempertontonkan ketidakharmonisan antar kementerian dan lembaga di pemerintah. Tapi tentu kami menginginkan apa solusinya. Dan tetap harus ada kesimpulan dari rapat hari ini. Kita berjam-jam rapat tentu harus ada, artinya rekomendasi atau apapun itu harus ada di dalam rapat dengan mitra pada hari ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum diskors tadi, dari teman-teman Komisi IX memang membahasakan bahwa memang rapat ini tidak ada kesimpulan, karena tujuan kita rapat ini pertama ini untuk membahas mengenai pembiayaan selisih. Dan tidak ada solusi disini. Tadi pernyataan Pak Menteri juga sudah menyampaikan kepada kami. Kemudian begitu juga Ibu Intan sendiri sudah menyampaikan bahwa terlihat ada ketidakharmonisan diantara kementerian dan lain sebagainya. ITu yang terlihat.

Kami memberikan keputusannya adalah Komisi IX memberikan kesempatan kepada Kementerian Kesehatan untuk dua-tiga hari kedepan untuk berembuk bicara seperti apa keputusannya. Dan kami juga akan mengambil sikap, Komisi IX akan mengambil sikap dengan besok untuk kita rapat jam 10.00 pagi mengambil sikap apa kira-kira dari pihak Pemerintah kepada masyarakat Indonesia dengan ada solusi atau tidak.

Kemudian tadi kami sudah membacakan juga, Komisi IX juga sudah membacakan hak-hak kami. Kami bisa menggunakan hak kami sebagai Anggota Komisi IX/Anggota DPR RI demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Jadi kami kira itu, kami tutup rapat ini.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Sebentar, Ibu, Saleh Daulay.

**KETUA RAPAT:**

Pak Saleh silakan. Pak Obon dulu, baru Pak Saleh.  
Kami persilakan Pak Obon.

**F-GERINDRA (OBON TABRONI):**

1 menit untuk Bapak Direktur BPJS.

Yang tadi saya sampaikan mohon segera mungkin, karena itu sifatnya hanya perban. Intinya adalah, selama proses PHK maka kedua-dua pihak harus tetap membayar iuran, dan hak-hak tidak dikurangi.

Saya di sebelah kiri Bapak.

Kedua, setelah ter-PHK menurut undang-undang 6 bulan setelah itu, maka *di-take over* oleh negara. Itu juga aturan undang-undang. Setelah 6 bulan kalau bekerja di tempat baru, maka mulai lagi perusahaan baru yang akan membayar. Bisa saja kalau kemampuan keuangannya mandiri maka di iur menjadi iurannya mandiri.

Karena itu lagi-lagi karena Perban saya rasa eksekusinya lebih cepat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Saleh Daulay.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Jadi begini, tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan beberapa poin tadi saya kira yang bisa dijadikan kesimpulan, justru itu kesimpulannya. Jadi jangan tidak ada kesimpulannya pula. Harus mengikat pula kesimpulan itu. Bahwa misalnya kita mau rapat, buat saja satu. Kemudian yang kedua kita akan undang lagi mereka. Itukan untuk kesimpulan. Jadi saya kira harus ada.

Tapi memang, saya mohon maaf ini, jujur saya kecewa sekali sore hari ini, itu ternyata BPJS sama Kementerian Kesehatan itu tidak *link*, tidak nyambung. Kan kasihan sekali kita. Mestinya kan itu tidak terjadi. Ini kan BPJS menolak ternyata dengan semua tuduhan-tuduhan tadi itu. Misalnya tidak transparan, kan Menteri Kesehatan mengatakan tidak ada solusi karena tidak transparan/belum transparan, misalnya seperti itu, sementara BPJS merasa 7 auditor yang memang selalu memonitor mereka. Ini kan sangat-sangat tidak seimbang atau tidak sesuai penjelasan itu. Nanti saya khawatir kita rapat lagi besok di internal kita, pemerintahnya masih seperti ini tidak ada solusinya juga, Pak Abidin. Lalu bagaimana, ini kan tidak boleh seperti itu juga, kita ini harus ada ujungnya apa yang harus kita lakukan.



Jadi karena itu menurut saya memang tidak apa-apa ditutup rapat ini. Tapi ada poin-poin penting yang harus kita tindaklanjuti dari hasil rapat ini. Ibu Ketua yang baik, ini penting. Jadi tetap saja dibuat itu tadi dua atau tiga poin kesimpulan tadi. Nanti silakan teman-teman untuk mengomentari kesimpulan itu. Karena itu akan mengikat kita untuk bekerja sungguh-sungguh. Jangan kita seperti tadi. Rakyat ini bilang kalau kita drama, sakit hati kita dibilang kita berdrama disini. Itu tidak betul. Ini kita sungguh-sungguh ini sedang mencari solusinya.

Demikian.

**INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Maaf Pak Saleh, Pak Saleh selalu sungguh-sungguh 'drama' menganggap kita itu drama atau bagaimana Pak? Kan tidak boleh begitu Pak.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Ini kan sungguh-sungguh.

**INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Kita juga sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai seolah-olah hanya yang bersungguh-sungguh Pak Saleh Daulay saja.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Bukan, semua kita sungguh-sungguh.

**KETUA RAPAT:**

Komisi IX.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Tidak boleh begitu.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Kan ada pakai kata 'kita', kita itu maksudnya termasuk Pak Abidin di dalamnya.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Karena Bapak selalu membicarakan soal 'drama' itu seolah-olah yang lain.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Saya tidak menyebut kata 'saya'. Saya bilang 'kita', kita ini sungguh-sungguh.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Karena Bapak yang mengatakannya seolah-olah yang sungguh-sungguh hanya Bapak, kita drama semua. Tidak boleh begitu Pak.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Saya lanjutkan. Nanti setelah ini silakan Pak Abidin yang mengatakannya supaya seolah-olah dia yang sungguh-sungguh, tidak apa-apa, *monggo*. Tapi bagi saya itu bukan substansi. Substansinya ini mesti harus ada solusinya. Karena kalau misalnya sudah selesai begini jangan sampai ada yang berbahagia ditutup rapat ini *alhamdulillah* selesai begitu. Maksudnya pihak pemerintah berbahagia.

Demikian. Saya rasa cukup Pak, tidak usah interupsi, saya sudah cukup.  
Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**INTERUPSI F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Interupsi, Pimpinan, usul. Pimpinan, sayap kiri.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Yang pertama saya sepakat bahwa memang ini harus ada *item-item* yang menjadi satu kesimpulan. Jadi apapun kesimpulannya diambil. Salah satunya adalah kita meminta agar Kementerian Kesehatan untuk bisa merealisasi dari hasil rapat yang pernah kita laksanakan pada tanggal 12, itu kan bagian yang harus kita minta. Jadi selama memang kesimpulan rapat pada tanggal 12 bulan lalu itu belum di realisasi, maka kita meminta agar itu bisa di realisasi. Salah satunya itu.

Kemudian yang kedua, saya senang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Abidin sama Pak Saleh ini. Tetapi ruhnya itu tetap sama bahwa ini adalah sama-sama untuk bisa menyelesaikan solusi yang terbaik ini.

Jadi saya pikir itu, sehingga sekarang *draft* kesimpulannya bagaimana, baru nanti kita sampaikan ke kementerian bagaimana.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Dari meja Pimpinan kalau saya menangkap dari teman-teman tadi ini sudah mulai melebar-melebar. Sebetulnya kesimpulan adalah tidak ada kesimpulan hari ini, tapi tetap kita mengawal untuk perjuangan kita urusan BPJS ini kenaikan dan lain sebagainya. Dan besok kita akan rapat internal. Kita berikan kesempatan kepada Pemerintah untuk berembuk dua-tiga hari kedepan, itu yang menjadi keputusan kita, tidak dalam bentuk kesimpulan kita.

Saya kira itu, saya tutup rapat ini.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL ..... WIB)**

**INTERUPSI F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T.):**

Interupsi, Pimpinan.

Mungkin saya pikir ini mungkin perlu dicabut dulu, mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau menurut saya kita harus mengambil sebuah kesimpulan dari rapat kita hari ini. Artinya begini, kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Minimal ini menjadi rangkaian kronologis semua, menjadi pembahasan kita.

Usul/saran saya, ini satu poin yang saya usulkan untuk poin kesimpulan yaitu Komisi IX akan mengadakan rapat internal menyikapi persoalan pembayaran hutang klaim rumah sakit dan penanggulangan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2019 dengan menggunakan hak Anggota DPR berdasarkan Undang-Undang MD3.

**INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Pimpinan, interupsi.

Tadi Ibu sudah menyatakan itu kesimpulannya, itu saja poin yang Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu tadi kan sudah menyampaikan, Ibu Ketua tadi di akhir sudah menyampaikan, itulah kesimpulannya menurut saya. Tapi tidak disampaikan dalam *closing statement*.

**KETUA RAPAT:**

Kesimpulan yang tidak tertulis.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Bukan *closing statement* dari Pimpinan. *Closing statement* dari Pimpinan itulah yang masuk dalam kesimpulan. Biar kita punya pegangan. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi jangan kalau ditanya apa hasil rapat pada hari ini “menurut Ketua tadi begini loh”, kan tidak enak begitu kan.

**KETUA RAPAT:**

Yang Pak Abidin inginkan adalah di tertulis.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Yang disampaikan Ibu Ketua tadi tertulis, itulah kesimpulan kita. Itu saja, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya cabut dulu.

**(SKORS DICABUT KEMBALI PUKUL ..... WIB)**

Silakan buat kesimpulan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, dua poin. Silakan tampilkan dua poin saja.

1. Bahwa Komisi IX memberikan kesempatan kepada pemerintah;

2. Kemudian Komisi IX akan mengadakan rapat besok pagi Jam 10.00 untuk menyiapkan segala sesuatunya. Apabila tidak ada solusi dari pemerintah, Komisi IX akan menyiapkan tentunya menggunakan hak yang sebagai Anggota DPR.

Itu kesimpulannya kami kira.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

Soal hak itu kan soal yang melekat, tidak usah ditulis di kesimpulan. Ini saja cukup ini.

**KETUA RAPAT:**

Kami mempersilakan kepada Bapak/Ibu sekalian untuk membaca kembali poin 1 dan poin 2. Kalau ada koreksi dipersilakan.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Koreksi sedikit.

Yang pertama, sebelum angka 1 itu menurut saya ada satu kesimpulan agar kementerian untuk bisa merealisasi hasil rapat pada tanggal 12 sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan.

Kemudian yang kedua baru masuk ini. Karena rapat yang tanggal 12 itu kan belum direalisasi.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira itu terlalu panjang Pak. Yang *simple* saja tapi tujuannya dapat.

Yang lain ada lagi masukan yang lain selain dari Pak Fadholi?

Teman-teman, kami persilakan fokus ke poin 1 dan poin 2.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Poin 1 itu ceritanya dampak itu. Kita itu menginginkan solusi untuk kenaikan iuran itu. Bukan dampaknya. Kalau dampaknya sudah terasa. Itulah karena dampak itulah makanya kita ribut di sini. Solusi *lah*, solusi supaya ini pemerintah mencari solusi. Bukan kita disuruh mencari solusi. Sebetulnya itu kan pekerjaan pemerintah mencari solusinya. Ini kurang pas ini. Itu TA coba diperbaiki itu, bukan begitu bahasanya. Cari solusinya.

**INTEUPSI F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M.):**

Interupsi, usul.

Untuk mencari solusi atas pembayaran utang klaim rumah sakit dan penanggulangan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Saya kira itu sudah *clear*. Kata *membahas*-nya ganti dengan '*mencari*'. Kalau *membahas* ini di sini sudah kita bahas, tapi tidak ada solusinya.

**INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

*Membahas diganti mencari.*

**INTERUPSI F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M.):**

Izin, Pimpinan.

Tadi pendapat Fadholi menurut saya memang harus jadi pijakan. Artinya poin kita di poin pertama adalah dasarnya rapat 12 Desember. Kenapa kemudian kita muncul rapat hari ini intinya kita mempertanyakan itu. Jadi pijakan kita harus berdasar juga. Jangan hasil kesimpulan rapat 12 Desember itu dianggap angin lalu. Itu harus masuk di dalam ayat (1)-nya.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana teman-teman yang lain?  
Kami perpanjang dulu Jam 18.15.

**(RAPAT: SETUJU)**

**INTERUPSI F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M.):**

TA komisi, merujuk kepada kesimpulan Rapat Kerja.

**INTERUPSI F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Izin, Pimpinan. Usul.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Ibu Netty.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

*Disebabkan, mungkin bukan merujuk kalimatnya, disebabkan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 12 Desember 2019 belum dapat dilaksanakan. Kan gagal, belum dilaksanakan.*

**KETUA RAPAT:**

Sudah diperbaiki.

Ada lagi yang untuk poin 1? Teman-teman, sudah? Saya baca poin 1:

*Merujuk pada kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 12 Desember 2019 belum dapat dilaksanakan, maka Komisi IX DPR RI meminta Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua DJS dan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi mencari solusi atas*

*kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III*

Ada yang mau tambah lagi? Silakan.

**INTERUPSI F-KB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

Izin, Ketua.

Mungkin *merujuk*-nya diganti dengan *mengingat hasil kesimpulan Rapat Kerja*.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Tidak usah pakai kata *hasil*. Kalau sudah kesimpulan itu sudah pasti *hasil* lah itu. *Mengingat kesimpulan rapat*, begitu langsung.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Dan kita tidak lupa, kenapa harus diingat. *Berdasarkan*.

**KETUA RAPAT:**

Ada yang mau ditambah, khususnya yang mandiri?

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Atau *disebabkan* tadi. *Disebabkan*, begitu.

**F-... (.....):**

Sebab akibat, kan sudah jelas ada kesimpulannya, ada surat tertulisnya, ada rekomendasinya.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Cocoklah *mengingat* itu.

**KETUA RAPAT:**

Ada tambahan kata lagi untuk poin 1, Teman-teman?

**F-... (.....):**

Tanggal 12 itu Raker atau RDP?

**KETUA RAPAT:**

Saya baca lagi sebelum saya ketok:

1. Mengingat kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 12 Desember 2019 belum dapat dilaksanakan, maka Komisi IX DPR RI meminta Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua DJSN dan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.

**INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Sebentar, Pimpinan.

Ini harus lurus dulu logikanya. Kan kalau kita melihat hasil kesimpulan rapat tanggal 12 menurut Menteri, BPJS, itu tidak dapat dilaksanakan, bukan belum dilaksanakan. Itu tidak dapat dilaksanakan. Jadi kalau kesimpulan tidak dapat dilaksanakan, walaupun tidak dapat dilaksanakan tetap harus kita mendesak dia mencari solusi. Jadi jangan dibalikkan lagi, nanti jawabannya tidak bisa dilaksanakan kesimpulan itu.

**KETUA RAPAT:**

Itu tadi saya minta untuk dikoreksi, Pak Abidin.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Jadi koreksi saya, Ketua. Jadi mengingat kesimpulan tanggal 12 itu tidak dapat dilaksanakan, maka Komisi IX meminta. Tetap harus mencari solusi. Jadi jangan mandeg di kesimpulan itu.

**KETUA RAPAT:**

Diperbaiki TA komisi.  
Sudah ya?  
Coba baca lagi, Pak Abidin.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Pimpinan itu yang harus baca itu, bukan saya.

**INTERUPSI F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Pak Abidin, kalau menurut saya jangan *mengingat* lah, tapi *mempertimbangkan*. Kalau *mengingat* itu kan diingat-ingat susah juga nanti. Jadi ini soalnya mempertimbangkan.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Nanti takutnya ditimbang-timbang, *aduh* ditimbang-timbang ini.

**INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Sebentar, Pimpinan.

Saya sudah usulkan tadi berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang kita putuskan itu tidak dapat dilaksanakan, maka Komisi IX meminta Menteri dan seterusnya mencari solusi. Jadi kata awalnya *berdasarkan kesimpulan rapat*.

**KETUA RAPAT:**

*Berdasarkan kesimpulan rapat, begitu?*

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Dasar kesimpulan tanggal 12 itu tidak bisa dilaksanakan, tetapi kita tetap meminta agar ada solusi. Itu maksudnya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan diperbaiki.  
Sudah?

**INTERUPSI F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Belum, sebelah kanan, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Saya baca sekali lagi ya?

**INTERUPSI F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Ketua, sebelah kanan, nomor satu sebelah kanan, Imam Suroso.

**KETUA RAPAT:**

Pak Imam, silakan.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Ini kita kalau tidak masukkan tidak menghormati, kasih tambahan *Dewas BPJS Kesehatan*. Itu ada orangnya. Karena apapun itu pengawas dari kita. Sama yang nomor 2 kasih pula itu. Kita pilih pusing-pusing, dia mesti rada pintar.

Terima Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sudah, Pak Imam?  
Baik, saya bacakan kembali:



*Berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 12 Desember 2019 tidak dapat dilaksanakan, maka Komisi IX DPR RI meminta Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.*

Oke, setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Sekarang poin 2:

2. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan kembali Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan RDP dengan Ketua DJSN, Dirketur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Itu pasti rapat kita. Tapi untuk apa rapat itu? Untuk apa? Untuk meminta solusi itu.

**KETUA RAPAT:**

Kaitannya dengan poin 1?

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Mungkin dicantumkan.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Iya dicantumkan, terhadap solusi kenaikan tadi itu.

Kalau ke 2 pasti kita bisa rapat, kapan juga bisa rapat. Tapi rapatnya bisa jadi bukan lagi soal itu kan. Tapi soal ini tetap saja kita memintakan.

**KETUA RAPAT:**

Kaitannya dengan poin 1 diperbaiki.  
Silakan Ibu Netty.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Pimpinan, izin.

Kalau merujuk pada kesimpulan rapat tanggal 12 Desember itu kan memang sudah ada menutup atau membayar selisih kenaikan. Jadi itu mungkin perlu disertakan.

**INTERUPSI F-KB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

Izin, Pimpinan.

Menurut saya tidak perlu, karena tadi tidak mungkin bisa jadi ada solusi lain yang lebih konkret.

**KETUA RAPAT:**

Poin kedua coba dibaca kembali, dilihat kembali, siapa tahu ada masukan. Jangan nanti saya mau ketok Pak Abidin lagi interupsi. Lama kita duduk di sini.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Ibu jangan cepat-cepat ketoknya. Pegang palunya agak lembut sedikit. Jangan sampai ketok-ketok itu cepat sekali.

**KETUA RAPAT:**

Tolong seluruh perhatian di poin kedua.

**INTERUPSI F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Izin, Pimpinan. Untuk yang kedua.

Menurut saya bahwa agenda rapat yang kedua bahwa ini adalah membahas solusi atas kenaikan iuran BPJS itu adalah salah satu, sehingga kalau ini nanti sudah diketok hanya ini, berarti kan masih ada rapat-rapat yang lain, sehingga kalau menurut saya kalau persoalan agendanya apa kan nanti akan dibahas, sehingga di sini tidak perlu masuk pada kesimpulan. Yang untuk membahas kenaikan iuran BPJS itu tidak perlu saya pikir, karena tidak hanya itu nanti agenda rapat kita yang akan datang, sehingga di sini tidak perlu menyebutkan agenda tersebut. Karena masih banyak agenda-agenda lain yang kemungkinan nanti akan diikutsertakan di dalam satu rapat itu. Dan itu kan kita sudah sepakat bahwa itu nanti besok kita akan ada Rapat Internal, kemudian kita bahas Rapat Internal. Selain persoalan ini yang akan kita bahas lagi dengan kementerian apa ini kan besok.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana teman-teman yang lain dengan pendapatnya Pak Fadholi, setuju?

**INTERUPSI F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Ketua, sebelah kanan Ketua, Imam Suroso.

Kalau rapat lain-lain dengan Menteri Kesehatan, BPJS memang sudah sering. Namun ini yang kita bahas kasus besar. Ini kan spesifik ini *boss*, jelas ya.

Kasus ini harus dijelaskan apa hasilnya dari satu itu. Rapatnya beliau, pemerintah sama Ibu Menteri Keuangan di lobi cari itu. Itu tetangga saya orang Semarang itu, tapi kalau dilobi serius bagus itu. Dia cerita Pak Jokowi selesai itu barang. Itu saja maksud saya.

Hasil dari nomor 1 itu sesuai tadi Pak Abidin bilang tadi, termasuk fokus itu. Kalau mau tambah *dan rapat lainnya*. Tapi fokusnya yang nomor 1 itu, itu hasilnya oke.

Terima kasih, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Fokusnya nomor 1 *dan lainnya*.

Kami persilakan dilengkapi. Di internal belum? Sudah?

Saya baca yang kedua sebelum saya ketok:

Komisi IX DPR RI akan mengagendakan kembali Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan RDP dengan Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 untuk membahas solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan'

Mana *dan lainnya*? Tidak usah? Ya sudah.

Baik, itu dari kami.

**(RAPAT: SETUJU)**

Kami persilakan untuk Pak Menteri merespon keputusan kami dan BPJS dan lain-lain yang hadir pada sore hari ini.

Kami persilakan.

**MENTERI KESEHATAN RI:**

Terima kasih Ibu Pimpinan Komisi IX dan semua Anggota Komisi IX.

**KETUA RAPAT:**

Mohon maaf, Pak Menteri, tolong di..., karena Pak Menteri punya suara ketutup dengan suara saya.

Silakan.

**MENTERI KESEHATAN RI:**

Terima kasih.

**Ibu Pimpinan dan semua Wakil Ketua dan juga para Anggota Komisi IX dan para hadirin semua,**

Kami siap menindaklanjuti apa yang diutarakan dalam Komisi IX ini.

Itu saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Direktur BPJS silakan.

**DIRUT BPJS KESEHATAN:**

Cukup, Ibu. Kami terima.

**KETUA RAPAT:**

Dari DJSN ada?  
Dari Dewas silakan.

**DEWAS BPJS KESEHATAN:**

Baik, Ibu. Siap dikawal nanti, kita akan lihat sejauhmana solusi yang akan kita bahas.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, dengan demikian rumusan kesimpulan dapat disetujui?

**INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Pimpinan, sebelum diketok, walaupun sudah setuju.  
Tidak apa-apa kalau tidak boleh.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Abidin.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Walaupun sudah disetujui, ini kan sudah koordinasi, sudah mencari, kira-kira perlu tidak, ini pertanyaan langsung ya, disebutkan eksplisit dengan presidennya. Saya tanya ini. Kalau sudah cukup, cukup. Tapi kalau perlu presiden harus disebutkan dengan presiden.

Cukup? Berarti tidak ada lagi pertanyaan nanti. Kalau sudah rapat lagi berarti dengan sendirinya itu sudah disampaikan ke presiden.

Begitu ya, Pak Menteri?

Oke, terima kasih. Ini penegasan saja.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Sebelum diketok, Ibu Ketua, ada satu usulan sedikit.

Tadi banyak sekali usulan teman-teman yang belum dijawab secara lengkap oleh Pak Menteri. Kalau bisa berkenan itu bisa dijawab secara tertulis dari pertanyaan teman-teman yang ada itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi nanti rapat berikutnya ada pertanyaan tadi yang keluar dari teman-teman Komisi IX disiapkan jawabannya secara tertulis.

Sebelum rapat ini saya tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai.

**(BERDOA BERSAMA)**

Doa selesai.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* rapat saya akhiri.

Selamat malam.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.23 WIB)**

Jakarta, 20 Januari 2020

a.n. KETUA RAPAT

Sekretaris Rapat

Yanto Supriyanto, S.H.

NIP. 196305241992031001